PENELITIHAN TINDAKAN KELAS

(PTK)

UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL *PROBLEM BASED LEARNING* KOLABORASI *THINK PAIR SHARE (TPS)* KELAS VIII.B

UPT SMP NEGERI 6 GRESIK TAHUN AJARAN 2020/2021



Oleh:

IMROATIN RUSLANA, S.Pd.

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

UPT SMP NEGERI 6 GRESIK

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Jl. Kanjeng Sepuh No. 1 Mriyunan Sidayu Gresik

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS

UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL *PROBLEM BASED LEARNING* KOLABORASI *THINK PAIR SHARE (TPS)* PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII.B UPT SMP NEGERI 6 GRESIK TAHUN AJARAN 2020/2021

Disusun Oleh

Nama : **Imroatin Ruslana, S.Pd**

Prodi : **PPKn**

Mengetahui

Kepala **UPT SMP N 6 Gresik**

Drs. MUAFIQ. M.Pd

NIP. 19610411993042002

Guru PPKN

IMRO'ATIN RUSLANA,S.Pd

UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING KOLABORASI THINK PAIR SHARE(TPS) PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII.B UPT SMP NEGERI 6 GRESIK.

Imroatin Ruslana*,.

Mapel PPKN, UPT SMP N 6 Gresik, .

Jalan : Kanjeng Sepuh Sidayu 61153

*Email: imroatinruslana20@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan observasi awal yang dilakulkan yaitu masalah yang di hadapi guru dalam proses pembelajaran di sekolah khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, salah satu masalah yang dihadapi oleh guru adalah motivasi belajar peserta didik mesih kurang karena peserta didik merasa pelajaran PPKN tidak menarik sehingga sulit memahami. Berdasarkan pengamatan penulis, ditemukan bahwa partisipasi belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UPT SMPN 6 Gresik masih belum maksimal. Penulis menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran *problem based learning* kolaborasi *Think Pair Share*. Melalui metode pembelajaran tersebut diharapkan partisipasi belajar siswa dapat meningkat secara maksimal.Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan observer. Langkahnya terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 32 peserta didik kelas VIII.B UPT SMPN 6 Gresik. Penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share(TPS)* Telah mampu meningkatkan partisipasi belajar dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa Kelas VIII.B UPT SMPN 6 Gresik Tahun Ajaran 2017/2018 sebanyak 30 siswa (93,75%) dari sejumlah 32 anak. Peningkatan partisipasi belajar siswa diketahui melalui kegiatan lembar pengamatan siswa yaitu pada saat siswa dikenai tindakan dengan menerapkan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share (TPS).* Partisipasi belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebelum tindakan hanya 12 anak (35%) dari 32 siswa. Putaran Siklus I menunjukkan siswa yang memiliki partisipasi belajar meningkat sebanyak 25 anak (78,1%) dan pada siklus II meningkat menjadi 30

Kata Kunci: *Think Pair Share (TPS),* Partisipasi Belajar*, Problem Based Learning,*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW,sehingga laporan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul:“ **Upaya Meningkatkan Partisipasi Belajar Siswa Melalui Penerapan Model *Problem* *Based* *Learning* Kolaborasi *Think Pair Share(TPS)* Pada Siswa Kelas VIII.B UPT SMP Negeri 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021**”

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kami sampaikan kepada:

(1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

(2) Drs. MUAFIQ. M.Pd selaku Kepala UPT SMP Negeri 6 Gresik

(3) Semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih banyak kekurangannya,oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan sarannya sehingga laporan penelitian ini menjadi lebih berkualitas.

Akhir kata semoga laporan penelitian ini memberikan makna dan manfaat khususnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Gresik, Oktober 2020

DAFTAR ISI

Halaman

COVER..... i
LEMBAR PENGESAHAN..... ii
ABSTRAK..... iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Perumusan Masalah..... 4
C. Tujuan Penelitian..... 4
D. Manfaat Penelitian 5

BAB II LANDASAN TEORI..... 7
A. Kajian Teori..... 7
B. Kerangka Pemikiran 15
C. Hipotesis Tindakan..... 17

BAB III METODE PENELITIAN..... 18
A. Setting Penelitian..... 18
B. Subjek Penelitian..... 19
C. Prosedur Penelitian..... 19
D. Jenis dan Sumber Data..... 24
E. Pengumpulan, Validitas, dan Analisis Data 24
F. Instrumen Penelitian..... 30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 33
A. Deskripsi Latar Penelitian..... 33

B. Refleksi Awal 36
C. Analisis Pencarian Fakta..... 39
D. Deskripsi Penelitian Siklus..... 39
E. Pembahasan..... 49
F. Keterbatasan Penelitian..... 50

BAB V PENUTUP 52
A. Kesimpulan 52
B. Implikasi..... 52
C. Saran 53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang pendidikan dewasa ini senantiasa mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan perkembangan masyarakat yang menuntut perbaikan kualitas dan mutu dibidang pendidikan. Namun masih diperlukan usaha-usaha untuk menentukan cara yang tepat agar ketrampilan dan kemahiran dapat dikuasai oleh siswa yang nantinya secara tidak langsung akan meningkatkan mutu pendidikan kearah yang lebih baik. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya pengembangan dan pembaharuan mengenai relevansi metode mengajar. Metode mengajar dikatakan relevan apabila mampu mengantar siswa mencapai tujuan pendidikan melalui pembelajaran. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Berkaitan dengan pendidikan, pemerintah merintis Kurikulum 2013 sebagai tindak lanjut pendidikan dalam mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang disusun untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirancang dalam Kurikulum 2013 masih sering dijumpai adanya permasalahan. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah kurangnya partisipasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Untuk mencapai

keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran, terdapat beberapa komponen yang dapat menunjang, yaitu komponen tujuan, komponen materi, komponen metode pembelajaran, dan komponen evaluasi. Komponen tersebut akan saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara memperbaiki proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, seorang guru hendaknya dapat mengembangkan proses pembelajaran aktif, sehingga dapat terwujudnya partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya partisipasi siswa yang optimal maka pengalaman belajar akan tercapai secara efektif dan efisien. Partisipasi belajar merupakan kesediaan siswa memberikan respons dengan cara berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Partisipasi siswa dapat diartikan sebagai sikap berperan serta, ikut serta, keterlibatan atau proses belajar bersama, saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan. Bentuk partisipasi siswa dalam proses pembelajaran antara lain memperhatikan penjelasan guru, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan atau saran, bekerjasama dalam kelompok, menyusun rangkuman atau laporan, dan memberikan kesimpulan tentang materi pembelajaran yang sedang dipelajari.

Rendahnya partisipasi belajar siswa akan berdampak pada rendahya hasil belajar siswa. Apabila siswa tidak berpartisipasi dalam proses pembelajaran, akan sulit untuk memperoleh makna, pengalaman, dan pengetahuan terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Tentu saja itu tidak diinginkan oleh siswa, orang tua siswa, maupun guru. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal tersebut guru harus selalu berupaya agar mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik dengan menerapkan metode pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sehingga siswa tidak akan merasa jenuh,

akan terasa lebih nyaman, dan akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Dengan cara begitu tujuan pembelajaran yang telah direncanakan akan dapat tercapai.

Dalam proses pembelajaran di sekolah khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sering dijumpai permasalahan yang dihadapi guru. Salah satu masalah yang dihadapi oleh guru adalah kurangnya partisipasi belajar siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran akan lebih efektif apabila siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pengamatan penulis, ditemukan bahwa partisipasi belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UPT SMPN 6 Gresik masih belum maksimal. Hal itu terbukti bahwa masih kurang keterlibatan siswa dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, dan kurangnya kemauan siswa untuk merespon dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar.

Permasalahan mengenai kurangnya partisipasi belajar siswa dirasakan penulis di UPT SMPN 6 Gresik Hal tersebut dibuktikan bahwa siswa masih banyak yang tidak memperhatikan penjelasan guru sampai selesai penjelasan guru. Untuk mengatasi siswa yang kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, guru pernah menggunakan berbagai metode pembelajaran. Dalam menangani masalah tersebut guru telah mencoba berbagai strategi pembelajaran, antara lain ceramah bervariasi, dan Tanya jawab. Strategi pembelajaran yang sudah digunakan belum mendapatkan hasil yang optimal karena belum dapat meningkatkan partisipasi belajar sebagian siswanya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu tindakan lain yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penulis menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran *problem based learning* kolaborasi *think pair*

share. Menurut Meilan Selly Putriana S.T (2009) kelebihan model pembelajaran ini adalah sebagai berikut:Menyebabkan siswa aktif dalam menjawab pertanyaan, melatih siswa berani dalam menyampaikan pendapat dan berani bicara di depan kelas dan memotivasi dalam belajar.

Melalui metode pembelajaran tersebut diharapkan partisipasi belajar siswa dapat meningkat secara maksimal. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dirasa cukup penting untuk mengadakan suatu penelitian tindakan kelas tentang "Upaya Peningkatan Partisipasi Belajar Melalui Penerapan Model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think pair share* dalam Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan pada Siswa Kelas VIII UPT SMPN 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah Penerapan Model *Problem Based Learning* kolaborasi *Think pair share* dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam materi memaknai peraturan perundang-undangan pada Siswa Kelas VIII UPT SMPN 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021 ?".

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Secara Umum,
    a. Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
    b. Untuk meningkatkan keberanian siswa mengemukakan pendapat dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

c. Untuk meningkatkan ketuntasan nilai KKM dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

2. Secara Khusus, penelitian ditujukan "untuk mengetahui Apakah Penerapan Model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think pair share* dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan pada Siswa Kelas VIII UPT SMPN 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021"

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Mendapatkan teori baru tentang upaya meningkatkan keaktifan belajar peserta didik melalui penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think pair share.*

b. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah

c. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

d. Menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai media untuk mentransformasikan ilmu yang diperoleh di pendidikan profesi guru dengan di lapangan guna menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

b. Bagi peserta didik

1) Untuk meningkatkan semangat peserta didik dalam kegiatan belajar.

2) Untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam bertanya dan berpendapat dalam kegiatan belajar.

3) Untuk meningkatkan perhatian atau konsentrasi peserta didik dalam menerima materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
4) Untuk meningkatkan peserta didik dalam menjawab pertanyaan.
5) Untuk meningkatkan prestasi peserta didik.

c. Bagi guru

1. Untuk meningkatkan strategi-strategi yang lebih bervariasi dan lebih menyenangkan.
2. Untuk mengembangkan keterampilan guru dalam kegiatan belajar mengajar.
3. Mendapatkan strategi pembelajaran yang baru.

d. Bagi sekolah

1. Untuk mengembangkan profesionalisme guru.
2. Untuk meningkatkan mutu pendidikan
3. Menjadikan sekolah lebih berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi dengan sekolah lain.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

Menurut Snelbecker (1974) sebagaiman dikutip Moleong (2011:57) teori adalah "seperangkat proposis yang berinteraksi secara sintaksi dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati".

1. Dinamika Paradigma Pembelajaran

a. Pengertian dinamika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:265) Dinamika yaitu "bagian dari ilmu yang berhubungan dengan gerak dan tenaga yang menggerakan, dimana gerak yang dimiliki sekumpulan orang di masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan di tata hidup masyarakat yang bersangkutan". Menurut Yulia (2010), Dinamika adalah "sesuatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan menyesuaikan diri secara memadai terhadap kenyataan".

b. Pengertian paradigma. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 828) Paradigma berarti "berkaitan dengan unsur bahasa dalam tingkat tertentu dengan unsur lain di tingkat itu".

c. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran sangatlah luas pengertiannya baik secara umum maupun khusus (dunia pendidikan), menurut Corey (1986: 195) "pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan siswa turut merespon situasi tertentu yang ia hadapi". Dalam aspek lain menurut Hamalik (2008:28) mengemukakan bahwa "pembelajaran adalah terjadinya hubungan timbal balik antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa itu sendiri, yang merupakan suatu sistem yang melibatkan belajar-mengajar", berdasarkan pengertian di atas pembelajaran ada kegiatan belajar dan mengajar dalam rangka menyampaikan dan penerimaan ilmu yang dilakukan terinteraksi antara guru dan siswa dalam suatu lingkungan.

2. Kajian mengenai Peningkatan Partisipasi Belajar Peserta didik

a. *Pengertian partisipasi.*

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris participate yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Willie Wijaya, 2004:208). Pengertian yang sederhana tentang

partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

b. Pengertian belajar. Menurut Slameto (2003:2) Belajar adalah suatu kegiatan yang membawa perubahan pada individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan melainkan juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, minat, penyesuaian diri, pendeknya mengenai segala aspek atau pribadi seseorang (Nasution, 1995:35). Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Winkel (1989:15) bahwa belajar pada manusia merupakan suatu proses siklus yang berlangsung dalam interaksi aktif subyek dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang bersifat menetap/konstan. Selain itu, Sardiman (1992:22) menyatakan bahwa belajar senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau keterampilan dengan serangkaian kegiatan misalnya membaca, mengamati, mendengarkan dan lain sebagainya.

Dari uraian beberapa pendapat diatas maka dapat dirumuskan defenisi belajar yaitu suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yaitu perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut adalah perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan tingkah laku yang bersifat menetap.

c. Macam-macam belajar.

Menurut Udhiexz (2011) macam-macam belajar adalah sebagai berikut:

1) Belajar arti kata-kata. Belajar arti kata-kata maksudnya adalah orang mulai menangkap arti yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Pada mulanya suatu kata sudah dikenal, tetapi belum tahu artinya.
2) Belajar Kognitif. bahwa belajar kognitif bersentuhan dengan masalah mental, dan objek-objek yang diamati dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang merupakan sesuatu yang bersifat mental.

3) Belajar Menghafal. Menghafal adalah suatu aktivitas menanamkan suatu materi verbal dalam ingatan, sehingga nantinya dapat diproduksikan (diingat) kembali secara harfiah, sesuai dengan materi yang asli, dan menyimpan kesan-kesan yang nantinya suatu waktu bila diperlukan dapat diingat kembali kealam dasar.
4) Belajar Teoritis. Bentuk belajar ini bertujuan untuk menempatkan semua data dan fakta (pengetahuan) dalam suatu kerangka organisasi mental, sehingga dapat difahami dan digunakan untuk memecahkan problem, seperti terjadi dalam bidang-bidang studi ilmiah.
5) Belajar Konsep. Konsep atau pengertian adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama, orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapinya, sehingga objek ditempatkan dalam golongan tertentu.
6) Belajar Kaidah. Belajar kaidah adalah bila dua konsep atau lebih dihubungkan satu sama lain, terbentuk suatu ketentuan yang mereprensikan suatu keteraturan. Orang yang telah mempelajari suatu kaidah, mampu menghubungkan beberapa konsep.
7) Belajar Berpikir. Orang dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan, tetapi tanpa melalui pengamatan dan reorganisasi dalam pengamatanmasalah harus dipecahkan melalui operasi mental, khususnya menggunakan konsep dan kaidah serta metode-metode bekerja tertentu.

d. *Pengertian siswa.* Menurut Danang (2011:10) “siswa yaitu sebagai senantiasa menuntut ilmu pengetahuan”. Siswa diartikan oleh Battistich (2008:29) “sebagai seseorang yang sedang dalam proses mengikuti pembelajaran untuk mendapatkan ilmu bagi dirinya di dalam lingkungan pendidikan”. Jadi siswa adalah seseorang yang menuntut ilmu untuk mendapat pengetahuan dan perubahan kearah yang lebih baik di dalam dunia pendidikan. Sehingga pembentukan karakter dalam diri siswa adalah suatu proses perubahan tingkah laku siswa kearah yang lebih baik dengan dibantu lingkungan sekitar baik lingkungan eksternal maupun internal (siswa itu sendiri), dalam rangka mencapai karakter siswa yang berbudi pekerti baik.

e. *Faktor-faktor meningkatkan partisipasi belajar peserta didik* Menurut Sudjana (dalam Hayati (2001:16) partisipasi siswa di dalam pembelajaran merupakan salah satu bentuk

keterlibatan mental dan emosional. Disamping itu, partisipasi merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang ditentukan oleh lima faktor, antara lain: 1) Pengetahuan/kognitif, berupa pengetahuan tentang tema, fakta, aturan, dan keterampilan membuat translation. 2) Kondisi situasi seperti: Lingkungan fisik, Lingkungan sosial, Psikososial, Danfaktor - faktor sosial. 3) Kebiasaan sosial, seperti kebiasaan menetap dan lingkungan. 4) Kebutuhan, meliputi: Kebutuhan Approach (mendekatkan diri), Avoid (menghindari), kebutuhan individual. 5) Sikap, meliputi: Pandangan/perasaan, Kesedian bereaksi, Interaksi sosial, Minat dan perhatian..Iqra (2011), menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat menumbuhkan timbulnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, yaitu:

1) Memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik, sehingga mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.
2) Menjelaskan tujuan intruksional (kemampuan dasar kepada peserta didik).
3) Mengingatkan kompetensi belajar kepada peserta didik.
4) Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep yang akan dipelajari).
5) Memberi petunjuk kepada peserta didik cara mempelajarinya.
6) Memunculkan aktivitas, partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
7) Memberi umpan balik (*feed back*).
8) Melakukan tagihan-tagihan terhadap peserta didik berupa tes, sehingga kemampuan peserta didik selalu terpantau dan terukur.
9) Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan diakhir pembelajaran.

f. *Macam-macam partisipasi belajar siswa* Paul D.Dierich dalam Martinis Yamin (2007:84) sebagaimana dikutip Anonim (2015) mengklasifikasikan kegiatan partisipasi dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan-kegiatan visual

   Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain.

2) Kegiatan-kegiatan lisan (*oral*)

   Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu tujuan, mengajukan suatu pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi.

3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permaianan, mendengarkan radio.

4) Kegiatan-kegiatan menulis

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisikan angket.

5) Kegiatan-kegiatan menggambar

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta dan pola

6) Kegiatan metrik

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pemeran, menari dan berkebun.

7) Kegiatan-kegiatan mental

Merenungkan, mengingatkan, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan.

8) Kegiatan-kegiatan emosional

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan overlap satu sama lain.

Suryosubroto (2002:71) sebagaimana dikutip Anonim (2015) menjelaskan bahwa partisipasi siswa dalam pembelajaran tampak dalam kegiatan:

1) Berbuat sesuatu untuk memahami materi pelajaran dengan penuh keyakinan
2) Mempelajari, mengalami, dan menemukan sendiri bagaimana memperoleh situasi pengetahuan.
3) Merasakan sendiri bagaimanan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepadanya.
4) Belajar dalam kelompok
5) Mencobakan sendiri konsep-konsep tertentu
6) Mengkomunikasikan hasil pikiran, penemuan, dan penghayatan nilai-nilai secara lisan atau penelitian.

g. *Indikator meningkatkan partisipasi belajar peserta didik..*

Menurut Sukidin (2002:158) mengemukakan bahwa patisipasi siswa dalam pembelajaran itu bisa berbentuk partisipasi kontributif dan partisipasi inisiatif, yaitu:

1) Partisipasi kontributif itu meliputi keberanian menyampaikan refleksi kepada guru, baik dalam mengajukan pertanyaan, merespon (termasuk menyampaikan usul/pendapat),

memberikan sanggahan, termasuk mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas terstruktur di kelas dan dirumah dengan baik.

2) Partisipasi inisiatif merupakan partisipasi siswa secara spontan dalam mengerjakan tugas mandiri tanpa terstruktur, inisiatif untuk minta ulangan formatif dan sumatif secara lisan, inisiatif mempelajari dan mengerjakan materi pelajaran yang belum dan akan diajarkan serta inisiatif membuat catatan ringkas.

Dari bentuk - bentuk partisipasi tersebut, maka yang menjadi indikator dari penelitian ini adalah:

1) Memperhatikan penjelasan guru.
2) Mengajukan pertanyaan.
3) Menjawab pertanyaan.
4) Mengemukanan pendapat atau saran
5) Kerja sama dalam kelompok.
6) Membuat rangkuman atau laporan.
7) Memberikan kesimpulan.

3. Kajian mengenai model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share*

a. *Pengertian model.*

Menurut Miftahul (2013:73) model pengajaran yaitu strategi-setrategi pengajaran yang membantu mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Menurut Joyce dan Weill dalam Miftahul (2013:73) model pengajaran sebagai rencana tau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, mendesain materi-materi instruksional, dan memandu proses pengajaran di ruang kelas atau di *setting* yang berbeda.Gerlach dan Ely (1980) sebagaimana dikutip Muchtar (2007:1.2), mengatakan bahwa“metode pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa”.

b. *Strategi belajar berbasis masalah* (*Problem Based Learning*).

Menurut Made (2008:91) Strategi berbasis masalah merupakan setrategi pembelajaran dengan menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalan praktis sebagai pijakan dalam belajar dengan kata lain siswa belajar melalui permasalahan-permasalahan.

c. *Karakteristik Strategi belajar berbasis masalah* (*Problem Based Learning*).

Menurut Sovoie dan Hughes dalam Made (2008:91) setrategi bernasis belajar berbasis masalah memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

1) Belajar dimulai dengan suatu permasalahan
2) Permasalahan yang diberikan harus berhubungan dengan dunia nyata siswa.
3) Mengorganisasikan pembelajaran di seputar permasalahan, bukan di disiplin ilmu
4) Memberikan tanggung jawab yang besar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendidri
5) Menggunakan kelompok kecil
6) Menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajarinya dalam nentuk produk dan kinerja.

d. *Tahapan pembelajaran Strategi belajar berbasis masalah* (*Problem Based Learning*).

Menurut Forgaty (1997) dalam Made (2008:92) tahap-tahap setrategi belajar berbasis masalah meliputi menemukan masalah, mendefinisikan masalah, mengumpulkan fakta, menyususn hipotesis (dugaan sementara), melakukan penyelidikan, menyempurnakan permasalah yang telah didefinisikan, menyimpulkan alternatif pemecahan secara kolaboratif, melakukan pengujian hasil (solusi) pemecahan masalah.

e. *Pengertian kolaborasi.*

Menuru kamus besar bahasa indonesia kolaborasi mengandung makna atau pengertian melakukan kerjasama untuk menyelesaikan masalah tertentu.

f. *Pengertian model Think pair share*.

Menurut Kagan (2007) model pembelajaran *Think pair share* ini secara tidak langsung melatih siswa untuk saling berbagi informasi, mendengarkan dengan cermat serta berbicara dengan penuh perhitungan, sehingga siswa lebih produktif dalam pembelajaran.

Menurut Tryana (jailani, 2012: 16).Model *Think pair share* adalah bagian dari model pembelajaran kooperatif struktural, yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Struktur Kagan menghendaki agar para siswa bekerja saling bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara

kooperatif.Struktur tersebut dikembangkan sebagai bahan alternatif dari sruktur kelas tradisional seperti mangacungkan tangan terlebih dahulu untuk kemudian ditunjuk oleh guru untuk menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan.Suasana seperti ini menimbulkan kegaduhan dalam kelas, karena para siswa saling berebut dalam mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan peneliti.

g. *Manfaat penerapan model Think pair share*.

Pembelajaran kooperatif sebagai sebuah pola atau rancangan yang disebut strategi pembelajaran, maka model pembelajaran kooperatif dalam pelaksanaannya dikelas memiliki manfaat sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim at all. (2000:18-19), yakni:

1) Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas.
2) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi.
3) Penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar.
4) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi.
5) Pemahaman yang lebih mendalam.
6) Konflik antar pribadi berkurang.
7) Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil.

h. *Kendala-kendala penerapan model Think pair share.* sebagai berikut:

1) Siswa tidak bisa aktif secara individu.
2) Siswa selalu ketergantungan pembelajaran berkelompok.
3) Tidak bisa mengetahui secara langsung siswa yang aktif dengan siswa yang kurang aktif.

i. *Kelemahan-kelemahan model Think pair share.*

Menurut Meilan Selly Putriana S.T (2009) kelemahan Think pair share sebagai berikut:

1) Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru.
2) Tidak semua anggota dipanggil oleh guru.
3) Pengondisian kelas kurang.
4) Waktu pembelajaran yang diperlukan menjadi lebih panjang.

j. *Kelebihan-kelebihan modelThink pair share*.

Menurut Meilan Selly Putriana S.T (2009) kelebihan adalah sebagai berikut:

1) Menyebabkan siswa aktif dalam menjawab pertanyaan.
2) Melatih siswa berani dalam menyampaikan pendapat dan berani bicara di depan kelas.
3) Memotivasi dalam belajar.
4) Melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai teman dalam kelompok.

k. Langkah-langkah penerapan model Think pair share. Menurut Spencer Kagan, (1992) yaitu:

1) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan masing-masing siswa dalam setiap kelompoknya mendapat nomor urut.
2) Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakan permasalahan.
3) Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini.
4) Guru memanggil salah satu nomor tersebut melaporkan hasil kerja kelompok.
5) Tanggapan dari teman lain, kemudian guru menujuk nomor yang lain.
6) Kesimpulan.

4. Kajian Mengenai Materi Memaknai Peraturan Perundang-Undangan

a. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). ”Negara Indonesia adalah negara hukum.”

b. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

c. Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

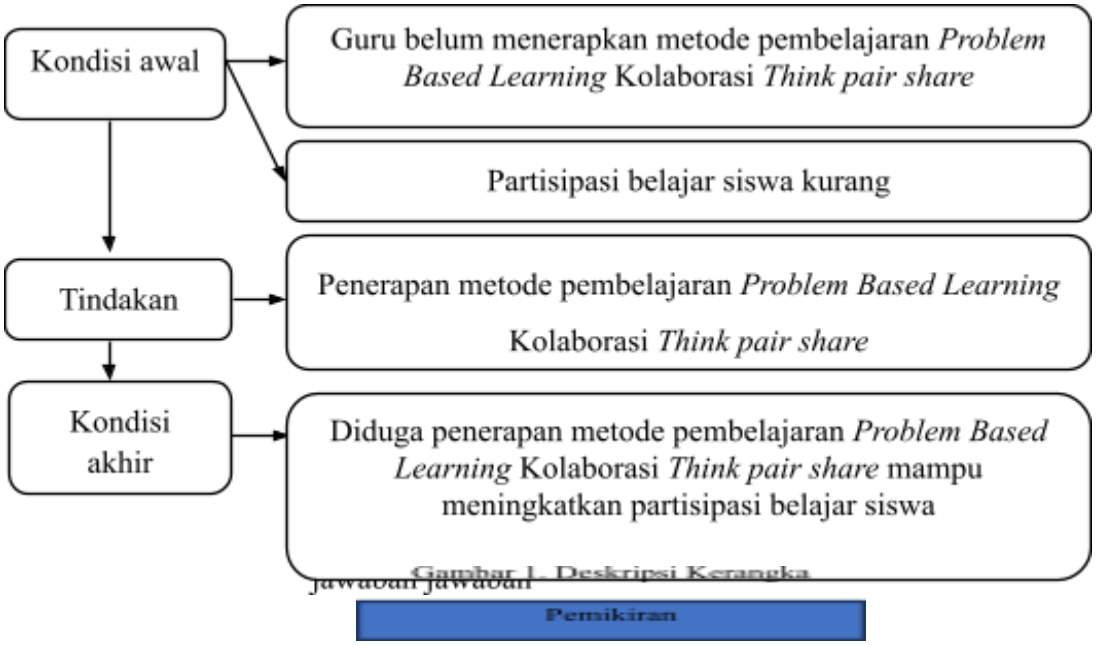
B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada hakekatnya bersumber dari kajian teoritis dan sering diformulasikan dalam bentuk anggapan dasar. Menurut Arikunto (1998:65), yang dimaksud anggapan dasar adalah "Suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas". Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap penyelidik harus mempunyai anggapan dasar yang dipakai sebagai dasar sementara bagi aktivitas penyelidikan atau penelitian secara ilmiah. Selanjutnya berkaitan dengan hal ini, Hadi (1987:16) mengemukakan bahwa penyelidikan ilmiah adalah,

Penyelidikan yang dapat memberikan pengetahuan yang valid dan reliable tentang gejala-gejala alam dan gejala-gejala sosial.Pengetahuan yang valid dan realiabel itu dapat dicapai karena penyelidikan ilmiah menggunakan postulat-postulat (landasan fikiran) yang pasti. Berdasarkan kajian teoritis sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini perlu mangajukan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think pair share* akan meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan pada Siswa Kelas VIII UPT SMP N 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021.
2. Penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think pair share* akan melibatkan peserta didik dalam Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan secara aktif.
3. Adanya keterkaitan antara penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think pair share* dengan peningkatkan partisipasi belajar siswa dalam Memaknai Peraturan Perundang-undangan pada Siswa Kelas VIII UPT SMP N 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021

Bila digambarkan maka akan tampak sebagaimana gambar siklus berikut ini.



Gambar 1. Deskripsi Kerangka Pemikiran

C. Hipotesis Tindakan

Menurut Arikunto (2006 a:71), Hipotesis adalah "sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara"Pada hakekatnya hipotesis adalah sebuah keputusan atau kesimpulan yang bersifat sementara, karena masih harus diuji kebenarannya secara empiris.

Peneliti telah mendalami permasalahan penelitian dengan seksama serta menetapkan anggapan dasar, maka penulis membuat suatu teori sementara, yang kebenarannya masih perlu diuji. Hipotesis yang akan diajukan oleh penulis dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah " Diduga Penerapan Model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think pair share* dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam materi memaknai peraturan perundang-undangan Kelas VIII UPT SMP N 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021".

BAB III
METODE PENELITIAN

A. *Setting* Penelitian

Tempat Penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di UPT SMP N 6 Gresik tahun pelajaran 2020/2021. Adapun tahap-tahap persiapan dari pelaksanaan sampai dengan tahap penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu bulan Agustus sampai dengan bulan November, adapun tahap-tahap perincian kegiatan pokok yang dilakukan adalah sebagaimana dipaparkan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Perincian Kegiatan Penelitian

No	Nama Kegiatan	Agustus 2020				September 2020				Oktober 2020				November 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Tahap Persiapan	X	X	X	X	X	X										
	Penyusunan Proposal	X	X	X													
	Mengurus Perijinan				X												
	Menyusun Instrumen					X	X										
2.	Tahap Pelaksanaan							X	X	X	X	X	X				
	a. Tahap Pra Siklus							X	X								
	b. Tahap Siklus I									X	X						
	c. Tahap Siklus II											X	X				
3.	Tahap Penyelesaian													X			
	a. Penyelesaian Kerangka Laporan													X	X		
	b. Tahap penulisan														X		
	c. Revisi dan Editing															X	
	d. penyerahan																X

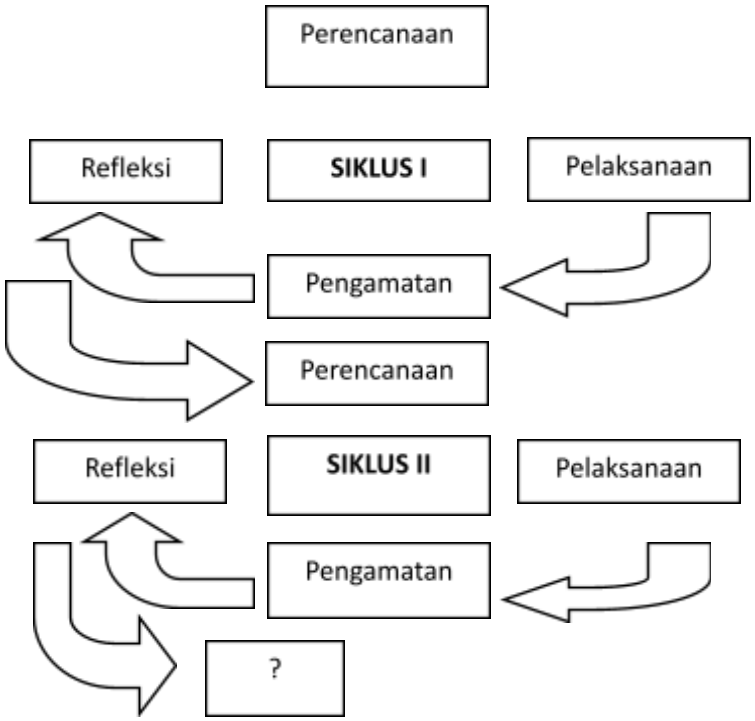
B. Subjek Penelitian

Menurut Suwandi (2009:55), subjek penelitian adalah "siswa dan guru yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran". Hal ini tergantung pada *setting* penelitian dan peneliti. Jika peneliti melakukan penelitian tindakan kelas di dalam kelas yang diampunya, maka subyek penelitian adalah siswa kelas itu, tetapi jika seorang peneliti melakukan penelitian tindakan kelas di kelas yang diampu oleh orang lain dan peneliti tersebut melibatkan guru kelas sebagai kolaborator, maka subyek penelitiannya meliputi siswa dan guru. Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini antara lain:

1. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraann UPT SMP N 6 Gresik yaitu bertindak sebagai subjek yang memberikan tindakan.
2. Seluruh siswa Siswa Kelas VIII UPT SMP N 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021 sebagai subjek penelitian yang menerima tindakan.
3. Peneliti sebagai subjek yang bertugas merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan penelitian.

C. Prosedur Penelitian

Menurut Arikunto (2006b:16), model penelitian tindakan kelas "secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan (2) pelaksana-an, (3) pengamatan, dan (4) refleksi". Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahapan adalah sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2. Siklus Prosedur Penelitian

Penjelasan dari langkah-langkah pelaksanaan penelitian di atas sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Siklus I

a. Perencanaan.

Perencanaan tindakan ini mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Siswa Kelas VIII UPT SMP N 6 Gresik. Kemudian disusun langkah persiapan tindakan pembelajaran yang terdiri dari:

1) Identifikasi masalah. Peneliti merumuskan permasalahan yang ada dialami oleh siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Perumusan masalah dilakukan dengan mewawancarai guru Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan yang menjadi subjek dalam penelitian sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa pada proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tindakan yang diterapkan pada identifikasi masalah antara lain:

a) Penerapan Model yaitu penerapan Model *Problem Based Learning* Kolaborasi Think Pair Share (TPS) dalam Materi Peraturan Perundang-undangan pada Siswa Kelas VIII UPT SMP N 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021

b) Bagaimana menyikapi partisipasi belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Materi Peraturan Perundang-undangan pada Siswa Kelas VIII UPT SMP N 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021?

c) Bagaimana mengusahakan siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Materi Peraturan Perundang-undangan pada Siswa Kelas VIII UPT SMP N 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021?

2) Perencanaan Solusi Masalah. Solusi yang peneliti tawarkan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi belajar siswa adalah:

a) Penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share (TPS)*

b) Tindakan pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa yaitu Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan masing-masing siswa dalam setiap kelompoknya mendapat nomor urut, Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakan kasus atau permasalahan tentang Peraturan Perundang-undangan, Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini, Guru memanggil salah satu nomor tersebut melaporkan hasil kerja kelompok, Siswa lain memberikan tanggapanterhadap kasus dan jawaban yang di presentasikan, kemudian guru menujuk nomor yang lain selanjutnya memberikan Kesimpulan.

b. *Pelaksanaan*.

Tindakan yang dilakukan oleh guru atas solusi yang ditawarkan oleh peneliti berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Perencanaan pelaksanaan tindakan bersifat fleksibel artinya selalu dapat dikondisikan bisa berubah sesuai kebutuhan pada saat pelaksanaantindakan berlangsung. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan masing-masing siswa dalam setiap kelompoknya mendapat nomor urut.
2) Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakan permasalahan.
3) Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini.
4) Guru memanggil salah satu nomor tersebut melaporkan hasil kerja kelompok.
5) Tanggapan dari teman lain, kemudian guru menujuk nomor yang lain.
6) Kesimpulan.

c. Observasi atau pengamatan.

Observasi adalah upaya mengamati segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pemberi solusi dan juga sebagai subjek yang melakukan tindakan. Peneliti dibantu oleh guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan selaku kolaborator penelitian melakukan observasi dengan mengamati kegiatan siswa di dalam kelas saat diberi tindakan dan mencatatnya sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Observasi dilaksanakan pada waktu pelaksanaan tindakan yaitu ketika pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share*.

d. Refleksi.

Refleksi dilaksanakan untuk mengkaji apa yang telah terjadi atau yang tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum dihasilkan selama tindakan berlangsung. Peneliti dan guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan selaku teman kolaborator penelitian melakukan diskusi mengenai kekurangan, kelemahan, atau catatan observasi pada saat tindakan berlangsung serta menghitung prosentase keberasilan penerapan tindakan yang digunakan sebagai acuan untuk siklus selanjutnya. Hasil refleksi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam upaya mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Dengan demikian, refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sementara. Refleksi dilakukan oleh peneliti dan guru yang berupa pengamatan untuk menelaah yang telah dilakukan. Refleksi dilaksanakan di bagian akhir siklus.

2. Siklus II

a. Perencanaan.

Perencanaan tindakan di siklus II ini mengacu pada hasil tindakan siklus I yang telah dilaksanakan sebagai solusi pemecahan permasalahan. Selanjutnya persiapan tindakan pembelajaran disusun langsung pada siklus II sebagai berikut:

1) Identifikasi Masalah. Tindakan yang dilaksanakan pada identifikasi masalah didasarkan pada hasil tindakan siklus I antara lain:
   a) Mengevaluasi kelemahan model pembelajaran *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share*.
   b) Menyikapi peningkatan partisipasisiswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
   c) Mengidentifikasi peningkatan partisipasi belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
2) Perencanaan Solusi Masalah. Solusi yang peneliti tawarkan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan keaktifan siswa adalah:
   a) Menerapkan model pembelajaran *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share*, dengan meningkatkan kualitas cara penyampaian.
   b) Meningkatkan kualitas pengelolaan kelas.
   c) Meningkatkan kualitas tugas yang diberikan kepada kelompok dalam pembelajaran.

b. ***Pelaksanaan***.

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada pertemuan berikutnya setelah siklus I selesai dilaksanakan. Peneliti bertindak sebagai guru berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

c. *Observasi dan Monitoring.*

Observasi dan monitoring dilaksanakan untuk melihat jalannya pelaksanaan tindakan yang didasarkan pada pelaksanaan siklus I. Semua proses jalannya pembelajaran dan peningkatan partisipasi belajar siswa dalamproses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan didokumentasikan oleh peneliti.

d. ***Refleksi***.

Pada siklus II dilakukan setelah semua proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Permasalahan-permasalahan yang ada dikaji dan dicarikan solusinya. Hasil refleksi

digunakan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam upaya mencapai tujuan.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, dan skema.Menurut Lofland (1984:47) sebagaimana dikutip Moleong (2011:157), "sumber data kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain". Selanjutnya menurut Schwandt (2007) sebagaimana dikutip oleh Creswell (2010:167), tujuan penelitian kualitatif yaitu, tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang diplih. Tujuan ini ditulis dengan istilah-istilah "teknis" penelitian yang bersumber dari bahasa penelitian kualitatif.

Menurut Arikunto (2006b:129), sumber data dalam penelitian adalah "subyek dari mana data diperoleh". Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang partisipasi belajar siswa dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, meliputi:

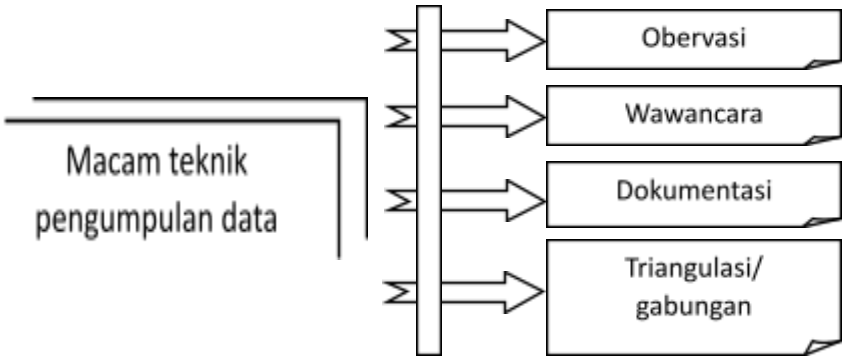
1. Informan atau narasumber, yaitu guru dan siswa kelas VIII UPT SMP N 6 Gresik
2. Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu di UPT SMP N 6 Gresik.

E. Pengumpulan, Validitas, dan Analisis Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Berkaitan dengan proses dengan proses pengumpulan data tersebut, Hadi (1989:89) menyatakan bahwa, Pengumpulan data dalam *research* ilmiah bermaksud memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan reliabel. Untuk memperoleh data seperti yang dimaksudkan itu pekerjaan *research*menggunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat-alat, serta kegiatan-kegiatan yang *dependable*, yang dapat diandalkan.

Sugiyono (2012:308) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bermacam-macam teknik pengumpulan data ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3. Macam-macam Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa cara pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan utama yang harus diperhatikan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. *Metode observasi.*

Menurut Walgito (2003:31), pengertian metode observasi yaitu,

> Suatu metode penelitian yang dijalankan secara sis-tematis dan dengan sengaja (jadi tidak asal atau sembarangan dan secara kebetulan) diadakan dengan menggunakan alat indera (terutama mata) sebagai alat untuk menangkap secara langsung kejadian-kejadian pada waktu kejadian itu terjadi.

Menurut Nawawi dan M. Hadari (1992:74),"Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian".selanjutnya menurut Sarwono (2006:224), "Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan".

Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengamati partisipasi belajar siswa kelas VIII UPT SMP N 6 Gresik dalam proses pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* pada proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

b. *Metode wawancara.*

Menurut Estenberg sebagaimana dikutip Sugiyono (2005:72), "Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukat informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu". Selanjutnya Stainback dalam Sugiyono (2005:72) menyatakan bahwa, wawancara bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Menurut Nasution (2001:113), "wawancara atau interviu adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi".

Menurut Nasution (2001:117-119), pada umumnya wawancara dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Wawancara berstruktur adalah wawancara yang semua pertanyaannya telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya secara tertulis. Wawancara berstruktur terikat dengan pertanyaan atau jawaban dan tidak membuka kebebasan bagi reponden untuk berbicara sesuka hatinya.
2) Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang tidak mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya. Responden boleh menjawab secara bebas menurut isi hati atau pikirannya. Keuntungan wawancara ini ialah kebebasan yang menjiwainya, sehingga responden secara spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakan.

Selanjutnya menurut Estenberg sebagaimana dikutip Sugiyono (2005:73-74), macam-macam wawancara antara lain wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.

1) Wawancara terstruktur *(structured interview)*.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data tidak mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara,

pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.

2) Wawancara semiterstruktur *(semistructure interview)*.

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview* yang dalam pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3) Wawancara tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan tidak terstrukur karena peneliti tidak menyiapkan daftar pertanyaan dan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan datanya. Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh melalui metode observasi, yaitu data mengenai partisipasi belajar siswa Melalui Penerapan Model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* dalam Materi Peraturan Perundang-undangan pada Siswa Kelas VIII UPT SMP N 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021.

c. *Metode dokumentasi.*

Sugiyono (2005:82) menyatakan bahwa, dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan *(life histories),* ceritera, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambarm patung, film, dan lain sebagainya. Selanjutnya Sarwono (2006:225) menyatakan bahwa,

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tertulis lainnya.

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh melalui metode observasi, dan wawancara yaitu data mengenai partisipasi belajar siswa dalam Materi Peraturan Perundang-undangan pada Siswa Kelas VIII UPT SMP N 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021.

2. Validitas Data

Menurut Sugiyono (2010b:267), "Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti". Terdapat dua macam validitas penelitian yaitu validitas internal dan eksternal.

Menurut pendapat Moleong (1990:175-178), dalam penelitian, pengujian keabsahan data penulisan dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Selain itu keikutsertaan juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan peneliti sendiri.

Menurut Moloeng (1990:178), mendefinisikan triangulasi adalah "teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu". Selanjutnya Patton (1987:329) sebagaimana dikutip Moleong (1990:178), triangulasi dilakukan dengan cara memanfaatkan metode, ini berarti peneliti mengadakan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Sugiyono (2005:83-84) menyatakan bahwa, trianggulasi yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Trianggulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Trianggulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data (kestabilan data).Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama yaitu triangulasi sumber data berupa informasi dari guru, siswa, dan dokumen tentang tindakan yang diterapkan. Kedua triangulasi teknik atau metode pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Analisis Data

Pengertian analisis data. Menurut Sugiyono (2010b:244), pengertian analisis data yaitu,

> Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara meng-organisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan analisis data model alir. Menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), langkah-langkah teknik analisis data model aliradalah sebagai berikut:

a. *Pengumpulan data.*

Pengumpulan data yaitu suatu proses mengumpulkan fakta-fakta dalam penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

b. *Reduksi data.* Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

c. *Penyajian data.* Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data juga bisa diartikan sebagai rakitan organisasi informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan saat penelitian dilakukan. Dalam penyajian data diperoleh berbagai jenis metrik gambar, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

d. *Penarikan kesimpulan.* Penarikan kesimpulan berarti dalam pengumpulan data, kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang diirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2010a:119), instrumen penelitian adalah "suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati". Arikunto (2007:101), mendefinisikan instrumen penelitian sebagai alat bantu, merupakan saran yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, daftar cocok, atau pedoman wawancara, lembar pengamatan atau panduan pengamatan, soal tes, skala dan lain-lain. Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data. Dengan demikian, terdapat kaitan yang erat antara metode dengan instrumen pengumpulan data.

Penelitian tindakan kelas ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Adapun alat-alat kelengkapan yang menunjang jalannya pelaksanaan proses pembelajaran dengan Penerapan Model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* dalam Materi Peraturan Perundang-undangan pada Siswa Kelas VIII UPT SMP N 6 Gresiktahun Ajaran 2020/2021 adalah:

1. Silabus
2. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
3. Buku Ajar PendidikanPancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII.
4. Instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Lembar pengamatan(lembar observasi).
6. Media pembelajaranlain seperti Laptop, LCD, papan tulis *(white board)* dan spidol.

Selain instrumen yang telah disebutkan di atas, dalam penelitian tindakan kelas ini juga menggunakan instrumen lain, yaitu:

1. Wawancara (Menggunakan pedoman wawancara)

Menurut Marzuki (2002:62), wawancara (*Interview)* adalah "cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian". Penelitian tindakan kelas ini menggunakan wawancara tak berstruktur, di mana pewawancara tidak mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya.Responden boleh menjawab secara bebas menurut isi hati atau pikirannya.

2. Observasi (Menggunakan lembar observasi)

Menurut Walgito (2003:31), observasi adalah suatu metode penelitian yang dijalankan secara sistematis dan dengan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera sebagai alat untuk menangkap secara langsung kejadian-kejadian pada waktu kejadian itu terjadi. Menurut Marzuki (2002:60), bentuk-bentuk observasi yaitu:

a. Membuat catatan anekdot atau catatan informal
b. Memberi tanda pada suatu daftar cek.
c. Mengecek dan menetapkan nilai pada skala penilaian
d. Pencatatan dengan bantuan alat

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan metode observasi, instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas VIII UPT SMP N 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021.

3. Dokumentasi (Menggunakan pedoman dokumentasi)

Menurut Moleong (2011;219-220), "Untuk menafsirkan dokumen yang padat isi biasanya digunakan teknik tertentu. Teknik yang paling umum digunakan ialah *content analysis* atau di sini dinamakan kajian isi". Selanjutnya menurut Weber sebagaimana dikutip Moleong (2011:220), "Kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen".

Menurut Sarwono (2006:226), pedoman dokumentasi adalah pedoman untuk menganalisis isi dokumen. Cara menganalisis isi dokumen yaitu dengan memeriksa dokumen secara sistematik mengenai bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumentasi secara objektif.

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan metode dokumentasi, instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman dokumentasi.Pedoman dokumentasi digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas VIII UPT SMP N 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021.

G. Indikator Kinerja

Menurut Sutama (2010:167), indikator kinerja adalah "rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan dalam menentukan keberhasilan atau keefektivan penelitian". Indikator kinerja

dalam penelitian tindakan kelas ini diharapkan dengan penerapan Model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share*, partisipasi belajar dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Materi Peraturan Perundang-undangan pada Siswa Kelas VIII UPT SMP N 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021 dapat meningkat minimal 80% dari semua siswa.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Latar Penelitian

1. Profil UPT SMP N 6 Gresik

Secara teritorial, UPT SMP Negeri 6 Gresik letaknya sangat strategis. Letaknya berdampingan dengan sekolah lain yang ada disekitarnya, baik negeri maupun swasta. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang sehat diantara mereka. Pandangan masyarakat terhadap sekolah sangat baik, hal ini ditunjukkan dari masukan (input) siswa yang sangat tinggi nilainya baik secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi semacam ini dapat memacu perkembangan UPT SMP Negeri 6 Gresik. Ditambah dengan peran serta stakeholder yang sangat tinggi untuk berupaya secara kompetitif meningkatkan mutu dan prestasi siswa.

UPT SMP Negeri 6 Gresik berdiri sejak tahun 1978 dengan nama SMP Negeri 1 Sidayu di tengah komplek pendidikan baik lembaga pemerintah maupun pondok – pondok pesantren dari tingkat TK / RA sampai dengan tingkat SMA/MA . Mata pencaharian masyarakat pada umumnya nelayan dan penghasil krupuk ikan. Sebagian besar anggota masyarakat masih kuat untuk mempercayakan putra-putinya di lembaga yang berbau agamis, dengan demikian walupun UPT SMP Negeri 6 Gresik ini lembaga pemerintah, namun pendidikan agama dikemas sedemikian rupa sehingga praktek-praktek ibadah dikemas dalam pengembangan diri yang mengacu pada kurikulum Ubudiyah yang telah disusun oleh tim pengembang kurikulum di UPT SMP Negeri 6 Gresik.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekolah berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan siswa. Upaya yang dilakukan melalui kerjasama dengan komite sekolah dan instansi-instansi yang terkait

2. Kondisi Awal Kelas VIII B UPT SMP Negeri 6 Gresik

Permasalahan yang dihadapi guru UPT SMP Negeri 6 Gresik.adalah kurangnya partisipasi siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab, namun pada penelitian ini faktor utama adalah penerapan strategi pembelajaran yang digunakan kurang menarik minat siswa yang ada di

kelas VIII B. Dari 32 jumlah siswa yang ada, hanya 12 orang yang berminat dalam artian siswa ini memperhatikan serta pastisipatif dalam proses pembelajaran. Bentuk partisipasi siswa serta perhatian siswa dapat berupa bertanya, menjawab pertanyaan dan berani mengemukakan pendapat pada saat pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta sisanya 22 anak bersikap pasif dan tidak memperhatikan saat guru menjelaskan.

Banyak siswa pasif dan kurang brekreasi tersebut maka perlu dibangun partisipasi belajar siswa belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan agar hasil belajar dan prestasi tercapai. Berdasarkan permasalahan di atas sehingga perlu dilakukan tindakan kelas yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Solusi alternatif dari permasalahan rendahnya partisipasi belajar siswa yang ditawarkan adalah dengan menggunakan modelpembelajaran *Problem Based Learning* Kolaborasi *UPT SMP Negeri 6 Gresik r.* Alasan dipilihnya model pembelajaran *Problem Based Learning* Kolaborasi *UPT SMP Negeri 6 Gresik* karena model ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan strategi ini siswa lebih berperan aktif,menantang, menyenangkan, dan materi dapat lebih cepat disampaikan dalam kelas. Peserta didikakan termotivasi untuk senang membaca dan dapat meningkatkanpartisipasisiswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Data Partisipasi Belajar Siswa Kelas VIII.B dalam Pembelajaran PPKn sebelum Pelaksanaan Model *UPT SMP Negeri 6 Gresik*

NO	NIS	NAMA	INDIKATOR PARTISIPASI BELAJAR			FREK U-EN SI
			1	2	3	
1	7659	ADELIA FITRI ANGGRAINI FATMAWATI			V	1
2	7499	ADINDA AULIA FIRDAUSI				
3	7627	ADINDA NUR FITRIANI		V		1
4	7596	AHMAD DZIKY ADZKIYA'				

5	7533	AHMAD MAULANA FIRMANSYAH	V			1
6	7564	AHMAD ROGHI FIKDANIEL				
7	7565	AHMAD SADDAM				
8	7535	ALLONG ANGGA SAPUTRA				
9	7506	ATHIYYA CHALYA FASA PUTRI	V	V		2
10	7538	AYUNDHA DWI NOVIANTY AFANDI				
11	7539	CITRA DWI NOVIA A		V		1
12	7663	DAFA AZZAHRAH ANAN				
13	7666	EDGAR IRFAN MAULANA				
14	7509	EKA ZULFIYYAH ROSITA				
15	7573	FIRDAYANTI HANUM		V		1
16	7511	JUSTINE FAWWAZ AL HAFIZH				
17	7610	LINDI CISTYA PRABA			V	1
18	7518	MUHAMMAD ALFIN NI'AM				
19	7693	MUHAMMAD ARIS MAULANA				
20	7584	MUHAMMAD DANI FAIDHIR ROKHMAN			V	1
21	7650	MUHAMMAD FADHIL ABHIRAMA				
22	7651	MUHAMMAD FAUZAN				
23	7549	MUHAMMAD KAFKA AMETHIS POETRA		V		1
24	7618	MUHAMMAD ZAHID ABDILLAH				
25	7653	MUHAMMAD ZAKA ABDILLAH MUSTAQIM				
26	7589	NAILATUL IZZAH				
27	7590	NAILU SYIFA'	V		V	1
28	7522	NAYLA IMTIYAS				

29	7623	SANDY SATRIO AJI FAHRUDDIN				
30	7624	TAFIYATUL ANANDA				
31	7594	USLIFATUL MASRUROH		V		1
32	7700	ZINTA NAJMA ANDINY	V			1
	Jumlah siswa yang memiliki Partisipasi Belajar					12
	Presentase					35%

Sumber: Hasil observasi di kelas VIII B UPT SMP N 6 GRESIK

Keterangan indikator partisipasi belajar:

1) Mengajukan pertanyaan
2) Merespon (termasuk menyampaikan usul/pendapat)
3) Memberikan sanggahan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut perlu adanya suatu perubahan terhadap model yang diterapkan dalam pembelajaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi belajar pada siswa.. Upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan ceramah variasi, diskusi kelompok, penugasan, presentasi. Berbagai model tersebut belum berhasil untuk meningkatkan kerativitas belajar siswa. Model yang ditawarkan oleh peneliti adalah penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi UPT SMP Negeri 6 Gresik. Diterapkannya model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* karena merupakan model pembelajaran aktif dengan sebuah kombinasi yang membutuhkan partisipasi siswa sehingga dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam pembelajaran.

B. Refleksi Awal

Dialog Awal

Dialog awal merupakan serangkaian kegiatan yang dilalukan peneliti dengan Ibu Dra. Gusma Eliza selaku guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas VIII B. Dialog awal membahas mengenai permasalahan, usaha, dan strategi yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran adalah kurangnya partisipasi belajar siswa. Kebanyakan siswa kurang bersungguh-sungguh saat guru menjelaskan materi dan siswa asik mengobrol atau bermain dengan temannya. Upaya yang telah dilakukan

antara lain menggunakan cara ceramah variasi, diskusi kelompok, penugasan, presentasi. Berbagai solusi tersebut belum berhasil untuk meningkatkan partisipasi belajar.

Identifikasi Masalah dan Penyebabnya

Permasalahan klasikal yang dihadapi di kelas VIII B yaitu kurangnya partisipasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab permasalahan tersebut terjadi. Peneliti beranggapan bahwa yang menjadi penyebab kurangnya partisipasibelajar dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Asumsi Penyebab Masalah Rendahnya Partisipasi Belajar dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Kelas VIII B Tahun Pelajaran 2020/2021

No	Faktor	Penyebab Masalah
1	Peserta didik	a. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kurang menarik minat siswa. b. Siswa menganggap mata pelajaran PPKn tidak penting. c. Mudah bosan terhadap pelajaran.
2	Guru	a. Strategi Pembelajaran kurang kreatif dan inovatif. b. Kecenderungan mengunakan model ceramah. c. Kurang memberi motivasi. d. Kurang mendorong siswa untuk mengeluarkan pendapatnya.
3	Proses Pembelajaran	a. Kurang menarik perhatian siswa. b. Penyampaian materi kurang variatif. c. Cenderung satu arah.

4	Materi ajar	Kompleks.

Beberapa kemungkinan penyebab masalah telah dijelaskan diatas sangat berpengaruh terhadap partisipasi belajar siswa. Berdasarkan pengkajian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab masalah paling dominan adalah mudah bosan terhadap pelajaran, hal tersebut berpusat pada model pembelajaran yang diterapkan kurang bervariasi yang terlalu banyak berpusat pada guru.

2. Perencanaan Solusi Masalah

Solusi masalah yang ditawarkan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu melalui penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* sebagai upaya meningkatkan partisipasi belajar dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tindakan pembelajaran melaui penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* akan diterapkan pada siswa dan dikembangkan pada setiap siklus tindakan melalui perencanaan yang terperinci.Melalui penerapanmodel *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* diharapkan dapat mengubah kebiasaan, dan model pembelajaran yang semula hanya berpusat pada guru akan berubah menjadi pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator. Selain itu penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* dapat meningkatkan partisipasi belajar dan daya berfikir siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

3. Perencanaan Tindakan

Perencanaan tindakan kelas dilakukan oleh peneliti dengan guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VIII B sebagai mitra kolaborasinya. Berdasarkan hasil serangkaian kegiatan yang dilakukan pada dialog awal, terlihat bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga partisipasi belajar sangat kurang yang berdampak pada hasil belajar yang dicapai peserta didik belum optimal. Hasil kesepakatan antara peneliti dengan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, perencanaan tindakan akan dilakukan pada bulan Oktober 2020. Hal ini sesuai dengan jadwal pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas VIII B UPT SMP N 6 Gresik

Tindakan yang akan dilakukan yaitu melalui penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* sebagai upaya meningkatkan partisipasi belajar dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Program tindakan pembelajaran dilakukan peneliti

sendiri dengan merancang perencanaan pembelajaran (RPP), pembagian segmen materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, dan mempersiapkan lembar pengamatan yang mengacu indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi belajar dari siswa pada setiap siklusnya.

C. Analisis Pencarian Fakta

Berdasarkan pengalaman peneliti pada waktu mengajar siswa kelas VIII B menyatakan bahwa partisipasi belajar dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat kurang. Permasalahan tersebut dikarenakan model pembelajaran guru yang kurang mengajak siswa untuk terlibat langsung ke dalam materi dan kurang membangkitkan semangat siswa dalam pembelajaran. Berdasarkan faktor-faktor penyebab tersebut guru dan peneliti merumuskan solusi dan rencana kegiatan yang perlu di lakukan. Tindakan solusi masalah yang ditawarkan dalam penelitian ini yaitu melalui penerapan model Problem Based Learning Kolaborasi Think Pair Share sebagai upaya meningkatkan partisipasi belajar dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* diharapkan dapat mengubah pembelajaran yang semula siswa kurang kreatif menjadi lebih kreatif dengan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena siswa diajarkan untuk aktif dan terlibat langsung. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memberikan tindakan adalah melalui tahap pertama dengan melaksanakan siklus tindakan yang ke I dan tahap kedua dengan melaksanakan siklus tindakan ke II. Siklus ke II dilaksanakan apabila pada siklus pertama belum memenuhi target yang ingin dicapai yaitu minimal 75 %.

D. Deskripsi Penelitian Siklus

Tindakan dilaksanakan sesuai dengan isi rancangan pembelajaran dan menerapkan rancangan tindakan yang telah disusun berdasarkan permasalahan yang diduga mempengaruhi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berakibat pada kurangnya partisipasi siswa dalam belajar. Peneliti melaksanakan tindakan pembelajaran pada kelas VIII B dengan berpedoman pada rencana pelaksanaan pembelajaran dan perencanaan tindakan kelas yang disusun sebelum pelaksanaan tindakan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun

oleh peneliti yang kemudian dikonsultasikan dengan guru sebagai mitra kolaborasi. Pelaksanaan tindakan penelitian dilakukan oleh peneliti sendiri dengan didampingi guru.

1. <u>Tindakan Kelas Siklus I</u>

Tindakan kelas siklus I adalah tindakan awal dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Ada beberapa tahap dalam melaksanakan siklus I sebagai berikut:

Perencanaan Siklus I. Model pembelajaran yang akan digunakan dalam siklus I ini adalah melalui penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share*. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 3 (tiga) jam pelajaran @ 40 menit sehingga pada siklus I lama tindakannya 3x40 menit. Alokasi waktu selanjutnya didistribusikan ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Materi yang diajarkan adalah peraturan perundang-undangan.. Adapun tindakan pembelajaran yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

a) Mengamati :

1) Peserta didik mengdengarkan penjelasan guru mengenai peraturan perundang-undangan Indonesia.
2) Guru menampilkan video yang berkaitan dengan pelaksanan peraturan lalu lintas di Indonesia

b) Menanya :

1) Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait materi dan video yang ditampilkan.
2) Guru menampung setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik.
3) Guru mengelompokan pertanyaan dari peserta didik sesuai indikator yang akan dicapai.

c) Mencari informasi :

1) Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok secara heterogen dan setiap siswa dalam kelompok mendapat nomor yang berbeda berdasarkan jumlah anggota dalam kelompok.
2) Peserta didik mendapatkan tugas untuk menganalisis kasus-kasus mengenai pelaksanaan undang-undang di Indonesia yaitu kasus kontroversi hukuman mati dan kasus kontroversi keberadaan transportasi online di Indonesia
3) Setiap kelompok mencari informasi di buku atau bahan ajar tentang kasus-kasus tersebut.
4) Peserta didik berhasil mengumpulkan informasi dari materi yang relevan dengan kasus-kasus mengenai pro dan kontranya di Indonesia.

d) Mengasosiasi :

1) Setiap kelompok berdiskusi untuk mencari solusi berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan.
2) Setiap kelompok menyusun hasil diskusi dalam bentuk laporan.

e) Mengomunikasikan :

1) Satu nomor peserta didik di panggil untuk melaporkan hasil diskusi mereka.
2) Salah satu nomor dari kelompok lain dipanggil untuk menanggapi atau bertanya tentang hasil presentasi dari kelompok penyaji.
3) Salah satu nomor dari kelompok penyaji di panggil untuk menjawab menjawab pertanyaan dari kelompok penanya.
4) Peserta didik keseluruhan diberi kesempatan untuk berpendapat mengenai kasus yang disajikan
5) Guru mengklarifikasi jawaban yang kurang tepat.

Pelaksanaan Siklus I. Tindakan kelas Siklus I dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 oktober 2020 pukul 11.20-14.20 WIB dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran @ 40 menit yaitu selama 120 menit. Sebelum pembelajaran dimulai peneliti melakukan presensi kepada siswa. Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, mengobservasi dan memonitoring selama pembelajaran berlangsung. Pada awal putaran pertama siswa terlihat bersemangat karena siswa mendapatkan pem-belajaran lebih bervariatif yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

Hasil tindakan kelas Siklus I. Hasil Observasi atau Monitoring Tindakan Siklus I sebagai berikut.

a) Pembelajaran.Pembelajaran pada siklus I dilaksanakan dalam satu putaran kegiatan. Pada awal pembelajaran peneliti melakukan presensi kepada siswa yang hadir. Peneliti menjelaskan materi sesuai dengan pokok bahasan, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan dan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Peneliti menunjuk nomor siswa secara acak untuk bertanya, mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan. Sebagian besar siswa yang ditunjuk masih belum bisa menjawab atau mengemukakan pendapatnya. Siswa dalam mengikuti pembelajaran masih belum memahami langkah-langkah model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* sehingga sebagian besar siswa belum mapu mengeluarkan partisipasi yang bereka miliki.

b) Partisipasi belajar siswa.

Partisipasi belajar pada siswa kelas VIII B dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih rendah terlihat saat pembelajaran berlangsung. Sebelum dilaksanakan model pembelajaran *Think Pair Share* adalah sebanyak 12 anak (35%) dari 32 siswa. Setelah diterapkannya pembelajaran *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share*partisipasi belajar dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan meningkat menjadi 25 anak (73,5%) dari 34 siswa sementara sisanya masih memiliki partisipasi yang rendah. Adapun rincian peningkatan partisipasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Data Partisipasi Belajar dalam Pembelajaran PPKn pada Siswa Kelas VIII B UPT SMP N 6 Gresik 2020/2021

Siklus I

NO	NIS	NAMA	INDIKATOR PARTISIPASI BELAJAR			FREKUENSI
			1	2	3	
1	7659	ADELIA FITRI ANGGRAINI FATMAWATI	V	V		2
2	7499	ADINDA AULIA FIRDAUSI		V		1
3	7627	ADINDA NUR FITRIANI		V		1
4	7596	AHMAD DZIKY ADZKIYA'	V	V	V	3
5	7533	AHMAD MAULANA FIRMANSYAH	V			1
6	7564	AHMAD ROGHI FIKDANIEL		V		1
7	7565	AHMAD SADDAM	V			1
8	7535	ALLONG ANGGA SAPUTRA				
9	7506	ATHIYYA CHALYA FASA PUTRI	V	V		2
10	7538	AYUNDHA DWI NOVIANTY AFANDI		V		1

11	7539	CITRA DWI NOVIA A		V		1
12	7663	DAFA AZZAHRAH ANAN				
13	7666	EDGAR IRFAN MAULANA				
14	7509	EKA ZULFIYYAH ROSITA	V			1
15	7573	FIRDAYANTI HANUM		V		1
16	7511	JUSTINE FAWWAZ AL HAFIZH		V		1
17	7610	LINDI CISTYA PRABA			V	1
18	7518	MUHAMMAD ALFIN NI'AM	V	V		1
19	7693	MUHAMMAD ARIS MAULANA				
20	7584	MUHAMMAD DANI FAIDHIR ROKHMAN			V	1
21	7650	MUHAMMAD FADHIL ABHIRAMA	V			1
22	7651	MUHAMMAD FAUZAN	V	V		1
23	7549	MUHAMMAD KAFKA AMETHIS POETRA		V		1
24	7618	MUHAMMAD ZAHID ABDILLAH				
25	7653	MUHAMMAD ZAKA ABDILLAH MUSTAQIM				
26	7589	NAILATUL IZZAH		V		1
27	7590	NAILU SYIFA'	V		V	2
28	7522	NAYLA IMTIYAS				
29	7623	SANDY SATRIO AJI FAHRUDDIN			V	1
30	7624	TAFIYATUL ANANDA	V			1
31	7594	USLIFATUL MASRUROH		V		1
32	7700	ZINTA NAJMA ANDINY	V			1
	Jumlah siswa yang memiliki Partisipasi Belajar					25
	Presentase					78,1%)

Sumber: Hasil Observasi Peneliti pada Siklus I tanggal 12 Oktober 2020

Keterangan indikator partisipasi belajar:

1) Mengajukan pertanyaan
2) Merespon (termasuk menyampaikan usul/pendapat)
3) Memberikan sanggahan

Berdasarkan hasil pengamatan sebagaimana yang tercantum pada tabel di atas data diketahui bahwa masih banyak siswa memiliki partisipasi yang masih rendah. Hal ini berarti melalui penerapan model Problem Based Learning Kolaborasi Think Pair Share pada Siklus I belum mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan.

Refleksi Siklus I. Berdasarkan hasil observasi atau monitoring tindakan pada siklus I di atas melalui penerapan model Problem Based Learning Kolaborasi Think Pair Share ini, partisipasibelajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan meningkat sebanyak 12 anak menjadi 25 murid (78.1%) dari 32 siswa, tetapi masih belum mencapai indikator yang diinginkan. Berdasarkan kegiatan refleksi diperoleh beberapa hal yang dapat dicatat sebagai masukan untuk perbaikan pada tindakan selanjutnya, yaitu:

a) Peneliti memberikan Kasus disesuaikan dengan kondisi saat ini dan yang sedang *up to date*.
b) Menugaskan siswa untuk belajar di rumah mengenai materi yang akan diajarkan minggu depan agar siswa tidak merasa takut salah.
c) Peneliti menugaskan siswa untuk mengerjakan soal yang telah diberikan untuk dijawab sebagai pekerjaan rumah.
d) Peneliti memotivasi siswa untuk berani mengeluarkan pendapat.
e) Peneliti memotivasi siswa untuk berani menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain.
f) Peneliti mengkondisikan siswanya secara tegas.
g) Peneliti memberikan *reward* kepada siswa untuk lebih membangkitkan partisipasi siswa pada saat pembelajaran.

2. <u>Tindakan Kelas Siklus II</u>

Tindakan kelas siklus II tahapan yang dilakukan setelah dilaksanakannya Siklus I selesai. Pada tahap II secara prinsip hampir sama dengan siklus I tetapi terdapat kemungkinan ada

perubahan yang merupakan perbaikan dari hasil evaluasi pelaksanaan siklus I. Langkah-langkah siklus II yaitu sebagai berikut:

Perencanaan Siklus II. Perencanaan tindakan kelas siklus II merupakan revisi dari perencanaan tindakan siklus I. Pada tindakan siklus I tidak ada pemberian motivasi kepada siswa, sehingga pada siklus II ini akan dilaksanakan. Pemberian motivasi ini bertujuan untuk meningkatkan keberanian siswa dan semangat siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pemberian motivasi itu sendiri berupa kata-kata penyemangat dan *reward*.

Pada siklus II ini menggunakan materi yang sama dengan pelaksanaan siklus I, materi yang akan peneliti sampaikan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan. Alokasi waktu pelaksanaan pembelajarannya 3 jam @ 40 menit pelajaran. Adapun tindakan pembelajaran yang dilakukan sebagai berikut:

a) Mengamati

1) Guru mengajak peserta didik untuk membaca materi tata urutan peraturan perundang-undangan

2) Guru membimbing peserta didik untuk mengamati dan mencermati video yang ditampilkan tentang kontroversi fullday school

3) Peserta didik menyimak penjelasan singkat guru tentang kontroversi fullday school dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran

b) Menanya

1) Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait materi dan video yang ditampilkan.
2) Guru menampung setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik.
3) Guru mengelompokan pertanyaan dari peserta didik sesuai indikator yang akan dicapai.

c) Mengumpulkan Informasi

1) Peserta didik dibentuk menjadi 5 kelompok dan setiap siswa dalam kelompok mendapat nomor yang berbeda berdasarkan jumlah anggota dalam kelompok.
2) Peserta didik mendapatkan tugas untuk menganalisis kkasus mengenai wacana fullday school
3) Setiap kelompok mencari informasi di buku, , majalah, media dan literatur yang lain tentang pro dan kontra pelaksanaan fullday school di Indonesia

4) Peserta didik menentukan bagaiamana kasus tersebut bisa terjadi, bagaimana pendapat tentang kasus tersebut, dan bagaimana solusi untuk mengatasi kasus tersebut.

d) Menalar/mengasosiasi

a) Setiap kelompok mendiskusikan, mengkaji, dan menganalisis hasil pengamatan yang diperoleh.

b) Peserta didik menyusun hasil diskusi kelompok, kajian, dan analisis untuk dikomunikasikan.

e) Mengkomunikasikan

a) Satu nomor peserta didik di panggil untuk melaporkan hasil diskusi mereka.

b) Salah satu nomor dari kelompok lain dipanggil untuk menanggapi atau bertanya tentang hasil presentasi dari kelompok penyaji.

c) Salah satu nomor dari kelompok penyaji di panggil untuk menjawab menjawab pertanyaan dari kelompok penanya.

d) Peserta didik keseluruhan diberi kesempatan untuk berpendapat mengenai kasus yang disajikan

e) Guru mengklarifikasi jawaban yang kurang tepat.

Pelaksanaan Siklus II. Pelaksanaan tindakan kelas pada siklus II yaitu hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 mulai pukul 11.20 -14.20 WIB. Jumlah siswa yang hadir yaitu 32 siswa berhalangan hadir 1 karena sakit. Selain melaksanakan tindakan, peneliti juga mengobservasi dan memonitoring selama pembelajaran berlangsung. Siklus II dilakukan dalam satu kali putaran pada saat jam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Hasil Tindakan Siklus II. Hasil observasi atau monitoring tindakan siklus II sebagai berikut.

a) Pembelajaran dimulai sesuai jadwal yaitu pada pukul 11.20 WIB. Peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang telah direncanakan dan proses pembelajaran pada siklus II dilaksanakan dalam satu putaran. Pada awal putaran ini secara umum siswa sudah memahami proses pelaksanaan model*Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* dengan baik. Pada saat siswa di minta bertanya, menjawab pertanyaan, atau mengemukakan pendapat, sebagian besar siswa sudah tidak merasa takut atau bingung lagi. Munculnya partisipasi siswa tersebut dikarenakan siswa sudah mengikut pembelajaran dengan menggunakan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* dengan baik dan dengan adanya

motivasi dan *reward* yang peneliti berikan, siswa menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran.

b) Partisipasi belajar siswa. Partisipasi belajar siswa pada tindakan siklus II ini meningkat. Pada siklus I partisipasi belajar siswa adalah 25 siswa (78,1%) dari 32 siswa dan pada siklus II meningkat menjadi 30 siswa (93,75%) dari 32 siswa. Hal ini berarti penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi belajar siswa. Adapun rincian peningkatan partisipasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Data Partisipasi Belajar dalam Pembelajaran PPKn pada Siswa Kelas VIII B Tahun Pelajaran 2020/2021

Siklus II

NO	NIS	NAMA	INDIKATOR PARTISIPASI BELAJAR			FREKUENSI
			1	2	3	
1	7659	ADELIA FITRI ANGGRAINI FATMAWATI	V	V		2
2	7499	ADINDA AULIA FIRDAUSI	V	V	V	3
3	7627	ADINDA NUR FITRIANI		V		1
4	7596	AHMAD DZIKY ADZKIYA'	V	V		2
5	7533	AHMAD MAULANA FIRMANSYAH	V	V	V	3
6	7564	AHMAD ROGHI FIKDANIEL		V		1
7	7565	AHMAD SADDAM	V			1
8	7535	ALLONG ANGGA SAPUTRA				
9	7506	ATHIYYA CHALYA FASA PUTRI	V	V		2
10	7538	AYUNDHA DWI NOVIANTY AFANDI		V		1
11	7539	CITRA DWI NOVIA A		V		1
12	7663	DAFA AZZAHRAH ANAN		V		1
13	7666	EDGAR IRFAN MAULANA	V	V		2
14	7509	EKA ZULFIYYAH ROSITA	V			1
15	7573	FIRDAYANTI HANUM		V		1
16	7511	JUSTINE FAWWAZ AL HAFIZH		V		1
17	7610	LINDI CISTYA PRABA			V	1
18	7518	MUHAMMAD ALFIN NI'AM	V			1
19	7693	MUHAMMAD ARIS MAULANA	V	V		2

20	7584	MUHAMMAD DANI FAIDHIR ROKHMAN			V	1
21	7650	MUHAMMAD FADHIL ABHIRAMA	V			1
22	7651	MUHAMMAD FAUZAN	V		V	2
23	7549	MUHAMMAD KAFKA AMETHIS POETRA		V		1
24	7618	MUHAMMAD ZAHID ABDILLAH	V	V		2
25	7653	MUHAMMAD ZAKA ABDILLAH MUSTAQIM	V			1
26	7589	NAILATUL IZZAH				
27	7590	NAILU SYIFA'	V		V	2
28	7522	NAYLA IMTIYAS		V		1
29	7623	SANDY SATRIO AJI FAHRUDDIN		V		1
30	7624	TAFIYATUL ANANDA	V			1
31	7594	USLIFATUL MASRUROH		V		1
32	7700	ZINTA NAJMA ANDINY	V			1
	Jumlah siswa yang memiliki Partisipasi Belajar					30
	Presentase					93,75%

Sumber: Hasil Observasi Peneliti pada Siklus II tangtgal 19 Oktober 2020

Keterangan indikator partisipasi belajar:

1) Mengajukan pertanyaan

2) Merespon (termasuk menyampaikan usul/pendapat)

3) Memberikan sanggahan

Berdasarkan hasil pengamatan tabel di atas, partisipasi belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengalani peningkatan yang cukup signifikan yatitu dari 25anak (78,1%) pada siklus I menjadi 30 siswa (93,75%) pada siklus II. Pada siklus II ini telah mencapai indikator kinerja yang telah ditargetkan sebesar 90 % dari jumlah siswa yaitu sebesar 30 peserta didik

Refleksi Siklus II. Pada akhir siklus II masih ada permasalahan kelas yang belum bisa diselesaikan yaitu masih terdapat siswa yang belum berani untuk menjawab pertanyaan yang telah peneliti berikan, serta masih malas untuk mengerjakan soal intruksi yang diberikan guru. Segi positif siklus II ini yaitu jumlah siswa yang memunculkan partisipasi untuk mengikuti

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sudah mencapai target indikator kinerja. Pelaksanaan tindakan kelas dari siklus I sampai dengan siklus II ternyata membawa perubahan yang positif. Dari kondisi awal siswa yang kreatif dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hanya 35%, pada siklus I meningkat menjadi 78,1 %, dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 93,75%. Berdasarkan hasil tersebut perlu dikembangkan lagi melalui penerapan model Problem Based Learning Kolaborasi Think Pair Share dalam pembelajaran. Dapat disimpulkan melalui penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas VIII B UPT SMP N 6 Gresik tahun pelajaran 2020/2021

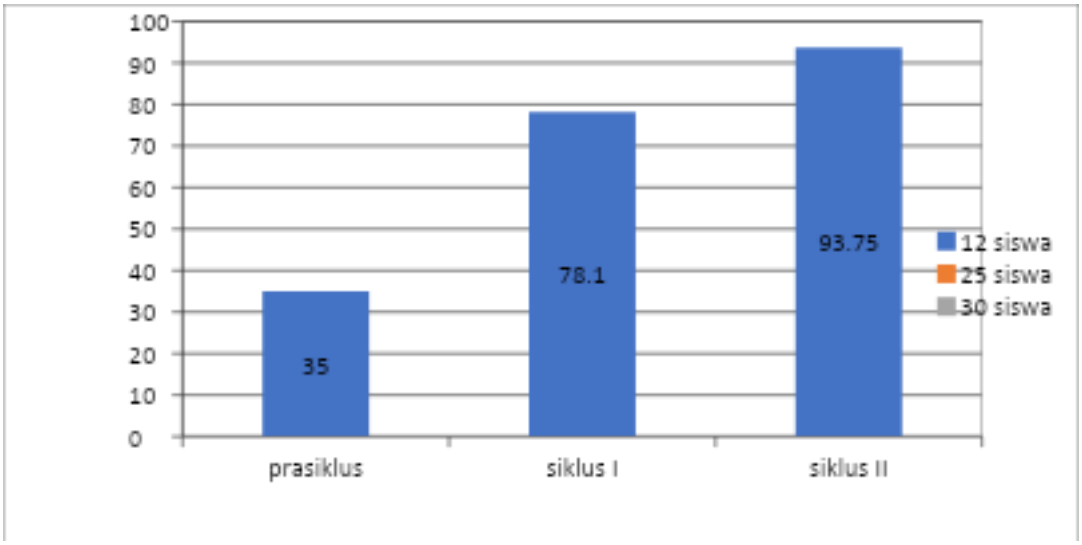
E. Pembahasan

Pembahasan ini berdasarkan analisis data kualitatif hasil penelitian. Peneliti melakukan tindakan kelas dimulai dari:perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan, dan refleksi. Hasil pembelajaran melalui penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* dan hasil penelitian yang dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan mitra kolaborasi dengan menerapkan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* telah membawa dampak perubahan yang positif terhadap siswa.

Pembelajaran melalui model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* ini meminta peserta didik untuk antusias atau semangat, senang terhadap pelajaran, berani menyampaikan jawabannya di depan kelas, terlibat langsung dalam pembelajaran dan melatih pengetahuan siswa mengenai materi dengan mengemukakan pendapatnya. Berkaitan dengan penerapan model Problem Based Learning Kolaborasi Think Pair Share ini secara perlahan-lahan dapat menambah rasa ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semakin meningkat. Pembenahan tindakan pada siklus II adalah dengan memberikan motivasi pada siswa berupa *reward* yang berfungsi untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa dan meningkatkan partisipasi belajar siswa pada saat pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewargwanegaraan berlangsung.

Pada waktu sebelum menerapkan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* jumlah siswa yang menunjukan partisipasi dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hanya 12 dari 32 anak atau dipersentasekan 35%. Peneliti

menerapkan model pembelajaran baru dalam pembelajaran yaitu melalui penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share.* Hasil setelah penerapan model *Think Pair Share*, jumlah siswa yang menunjukan partisipasi dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan meningkat menjadi 25 dari 32 siswa atau dipersentasekan 78,1%. Akan tetapi hasil pada siklus I ini belum mencapai indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, oleh karena itu peneliti mengadakan revisi dan evaluasi lagi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada siklus II meningkat menjadi 30 dari 32 peserta didik atau dipresentasekan 93,75%. Dapat dikatakan tindakan kelas siklus II ini sudah mencapai indikator yang diinginkan oleh peneliti. Melalui penerapan model Problem Based Learning Kolaborasi Think Pair Share dapat terlihat peningkatan partisipasi belajar siswa. Grafik peningkatan partisipasi belajar dalam pembelajaran Pendidikan Panacasila dan Kewarganegaraan pada siswa dari prasiklus sampai siklus II sebagaimana gambar berikut ini.



Gambar 3. Grafik Peningkatan Partisipasi Belajar dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas VIII A UPT SMP N 6 GresikTahun Pelajaran 2020/2021 dari Prasiklus sampai Siklus II

Keterangan:

1. Siswa yang memiliki partisipasi belajar padaprasiklus sebanyak 12 anak (35%).
2. Siswa yang memiliki partisipasi belajar pada siklus I sebanyak 25 anak (78,1%).
3. Siswa yang memiliki partisipasi belajar pada siklus II sebanyak 30 anak (93,75%).

F. Keterbatasan Penelitian

Kegiatan dalam suatu penelitian pasti mempunyai beberapa keterbatasan-keterbatasan tindakan. Upaya Meningkatkan partisipasi belajar melalui penerapan model Problem Based Learning Kolaborasi Think Pair Share dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas VIII B UPT SMP N 6 Gresik Tahun Pelajaran 2020/2021 memiliki beberapa keterbatasan penelitian, antara lain:

1. Keterbatasan dalam Penerapan Strategi Pembelajaran

Penerapan model Problem Based Learning Kolaborasi Think Pair Share ini terbatas dalam penerapannya. Model tersebut lebih cocok diterapkan dalam tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa, karena dengan menggunakan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* dapat menarik siswa untuk bertanya, mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan.

2. Keterbatasan Kelas

Keterbatasan kelas merupakan suatu kendala bagi penelitian ini, karena penelitian hanya difokuskan pada satu kelas saja yaitu kelas VIII B UPT SMP N 6 Gresik Tahun Pelajaran 2020/2021 yang berjumlah 32 siswa. Penelitian ini belum tentu akan memberikan hasil yang sama bila diterapkan di kelas-kelas lain.

3. Keterbatasan Jenjang Pendidikan

Penelitian yang telah dilaksanakan ini terbatas pada jenjang pendidikan tertentu yaitu di SMP. Hasil Penelitian ini belum tentu dengan penerapan model pembelajaran dan pelaksanaan tindakan yang sama mampu meningkatkan partisipasi belajar siswa pada jenjang pendidikan yang lainnya, seperti PAUD atau TK, SD, SMP, MTs,SMA dan lain sebagainya.

4. Keterbatasan Materi

Penelitian ini terbatas pada materi tertentu, dalam penelitian ini berfokus pada tema yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Belum tentu melalui penerapan model Problem Based Learning Kolaborasi Think Pair Share ini dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa jika diterapkan pada materi yang lain.

5. Keterbatasan Siklus

Penerapan model Problem Based Learning Kolaborasi Think Pair Share sebagai upaya meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbatas pada dua siklus saja, yaitu siklus I dan Siklus II. Penerapan model Problem Based Learning Kolaborasi Think Pair Share berulang kali sampai beberapa siklus

akan menimbulkan kejenuhan pada siswa dan belum tentu dengan penambahan siklus mendapat hasil yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut penelitian dihentikan dengan pencapaiaan sudah cukup memuaskan dan bisa dijadikan pembelajaran untuk lebih baik lagi dalam penelitian berikutnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian putaran penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan terlihat adanya perubahan yang merupakan hasil penelitian dalam rangka usaha meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa Kelas VIII.B UPT SMP Negeri 6 Gresik Tahun Ajaran 2019/1920 melalui penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share*. Bertitik tolak dari tindakan yang telah dilaksanakan pada penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

1. Penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* telah mampu meningkatkan partisipasi belajar dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa Kelas VIII.B UPT SMP Negeri 6 Gresik Tahun Ajaran 2019/1920 sebanyak 30 siswa (93,75%) dari sejumlah 32 anak. Peningkatan partisipasi belajar siswa diketahui melalui kegiatan lembar pengamatan siswa yaitu pada saat siswa dikenai tindakan dengan menerapkan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share.*
2. Partisipasi belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebelum tindakan hanya 12 anak (35%) dari 32 siswa. Putaran Siklus I menunjukkan siswa yang memiliki partisipasi belajar meningkat sebanyak 25 anak (78,1%) dan pada siklus II meningkat menjadi 30 siswa (93,75%). Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat peningkatan sebesar 15,65% dari siklus I ke siklus II. Sementara itu, secara keseluruhan dari kondisi awal, siklus I, dan siklus II mengalami peningkatan sebesar 58,75%.

B. Implikasi

Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa melalui penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* dapat meningkatkan partisipasi belajar dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas Kelas VIII.B UPT SMP Negeri 6 Gresik Tahun Ajaran 2019/1920. Penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* dapat menarik siswa untuk bertanya, menyampaikan pendapat dan gagasan, serta menjawan pertanyaan pada saat pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Salah satu model Pembelajaran yang tepat model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share.*

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru maupun calon pendidik untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam pembelajaran. Hendaknya guru dalam mengajar lebih variatif dan inovatif karena peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator. Guru seharusnya dapat meng-gunakan model pembelajaran aktif untuk mewujudkan pembelajaran yang variatif dan inovatif. Pembelajaran aktif akan secara langsung melibatkan siswa dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas. Apabila siswa sudah menunjukan partisipasi yang baik dan benar maka bisa dipastikan hasil dari pembelajarannya akan baik sehingga diperoleh pemahaman serta keaktifan dan nilai yang sesuai KKM yang ditetapkan disekolah. Berarti bahwa semakin tinggi partisipasi belajar pada siswa maka semakin tinggi pula prestasi yang akan dicapai.

C. Saran

Berdasarkan pengalaman dalam menerapkan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share,* maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terhadap Kepala Sekolah
   a) Kepala sekolah harus melakukan pemantauan proses pembelajaran di kelas. Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui situasi pembelajaran kelas dan masalah-masalah yang muncul dari masing-masing kelas serta berusaha mengatasi permasalahan tersebut tentunya bekerja sama dengan para guru.
   b) Kepala sekolah hendaknya menerima dan mendengarkan segala masukan dari guru maupun siswa terhadap masalah pembelajaran yang terjadi, agar dapat dipecahkan degan baik demi keberhasilan bersama.

c) Kepala sekolah dapat melakukan peningkatan mutu pembelajaran dengan melibatkan peran guru, sehingga mutu sekolah akan meningkat pula.

2. Terhadap Guru Kelas
   a) Guru dapat mengembangkan pembelajaran aktif di kelas.
   b) Guru hendaknya lebih rajin merevisi strategi pembelajarannya, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.
   c) Guru perlu melakukan pemantauan terhadap siswa pada saat pembelajaran, sehingga permasalahan yang muncul bisa diatasi dengan cepat dan tepat.
   d) Guru hendaknya mampu mengondisikan kelas dan siswanya dengan baik.
   e) Guru hendaknya menjadi fasilitator dalam berlangsungnya pembelajaran agar mampu mengembangkan potensi peserta didik.
3. Terhadap Siswa
   a) Setiap siswa hendaknya selalu berminat dalam mengikuti semua mata pelajaran.
   b) Setiap siswa hendaknya dapat menjalin hubungan yang baik dengan guru maupun bekerja sama dengan teman-temannya agar pembelajaran terasa nyaman dan menyenangkan.
   c) Siswa hendaknya lebih aktif dalan mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
4. Terhadap Sekolah
   a) Sekolah diberikan sarana dan prasarana yang memadai, agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai harapan.
   b) Sekolah memerlukan studi banding ke lembaga yang terkait, agar bisa bertukar informasi mengenai kegiatan pembelajaran.
5. Terhadap Peneliti Berikutnya.

Penelitian sejenis hendaknya dilakukan tetapi dalam cakupan materi tertentu dan menerapkan model pembelajaran tertentu. Diperlukan sebuah model pem-belajaran dari guru yang lebih inovatif, sehingga akan mampu memberikan masukan kepada dunia pendidikan Indonesia secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2006a. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2006b. *PenelitianTindakanKelas*.Jakarta: BumiAksara.

Arikunto, Suharsimi.2007.*ManajemenPenelitian*. Jakarta: RinekaCipta.

Bakry, Noor. 2009. PendidikanKewarganegaraan. Yogyakarta:Pustakabelajar.

Creswell, John W. 2010. *Research Design PendekatanKualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: PustakaBelajar.

Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hadi, Sutrisno.1989. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hamalik, Oemar. 1995. *KurikilumdanPembelajaran.* Jakarta: BumiAksara.

Kansil. C.S.T. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Padnya Paramita.

Moleong, Lexy J. 2011. *MetodologiPenelitianKualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.

Muchtar, Suwarma dkk. 2007. *StrategiPembelajaranPKn.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Nasution, S. 2001. *Metode Research (PenelitianIlmiah)*. Jakarta: BumiAksara.

Nawawi, Hadaridan M. Martini.1992. *InstrumenPenelitianBidangSosial.*Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Slameto. 2003. *BelajardanFaktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT RinekaCipta.

Sriyono. 2012. *Penerapan Metode Pembelajaran Cooperative Script Untuk Meningkatkan Partisipasi Belajar Siswa Kelas VIII A Smp Negeri 2 Karanggayam Tahun Pelajaran 2012/2013.* (Skripsi S-1). Purworejo: Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods*). Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 1995. *MetodologiPenelitian.* Jakarta: Rajawali Press.

LAMPIRAN A

PERANGKAT PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : UPT SMP Negeri 6 Gresik
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : VIII/I
Materi Pokok : Makna peraturan perundang-undangan nasional
Waktu : 1 x Pertemuan (3x40 menit)

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1	1.3 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.	1.3.1 Menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.

2	2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional	2.3.1 Menunjukkan sikap menghormati terhadap aturan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional 2.3.2 Menunjukkan sikap taat terhadap aturan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
3	3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia	**3.3.1 Mendeskripsikan makna peraturan perundang-undangan nasional** 3.3.2 Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia 3.3.3 Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia 3.3.4 Menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional
4	4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia	4.3.1 Menunjukkan keterampilan mengamati tentang tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional 4.3.2 Menyusun laporan hasil telaah tentang tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional 4.3.3 Menyajikan laporan hasil telaah tentang tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional

Karakter yang diharapkan untuk dimiliki peserta didik meliputi rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan disiplin

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menghayati nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
2. Menerapkan sikap taat terhadap aturan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
3. Menjelaskan makna peraturan perundang-undangan nasional
4. Menyajikan laporan hasil telaah tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional

C. MATERI PEMBELAJARAN

1. Materi Reguler

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Makna peraturan perundang-undangan

c) Fungsi peraturan perundang-undangan
d) Prinsip peraturan perundang-undangan

2. Materi Remedial
Kasus-kasus terbaru di media terkait dengan masalah pengesahan perundang-undangan

3. Materi Pengayaan
a) Azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai UU No 12 Tahun 2011
b) Azas materi peraturan perundang-undangan sesuai UU No 12 Tahun 2011

D. METODE/MODEL PEMBELAJARAN

Metode : Diskusi

Model pembelajaran : Problem Based Learning dan Think Pair Share

E. MEDIA PEMBELAJARAN

Media: Video kasus razia polisi dan power point materi makna peraturan perundang-undangan

Alat/bahan: laptop. Proyektor, speaker

F. SUMBER BELAJAR

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3) Dedi Ismatullaah dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Kehidupan Ketatanegaraan di Negara republic Indonesia*. Bandung:Pustaka Setia
4) Jimly Asshiddique. 2009. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis serta sumber belajar 2. Guru memberi motivasi dengan cara menampilkan tayangan video yang	15 menit

	memperlihatkan ketridaktaatan terhadap peraturan 3. Guru melakukan apresiasi melalui tanya jawab mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tata peraturan perundang-undangan 4. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai	
Inti 1. Orientasi 2. Merumuskan masalah 3. Merumuskan hipotesis 4. Mengumpulkan data 5. Menguji hipotesis 6. Merumuskan kesimpulan	1. Guru memberikan materi pengantar tentang makna peraturan perundang-undangan nasional 2. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan masing-masing siswa dalam setiap kelompoknya mendapat nomor urut 3. Peserta didik mengamati kasus yang diberikan oleh guru tentang kasus ojek online dan kasus hukuman mati untuk koruptor 4. Peserta didik secara berkelompok menjawab pertanyaan yang diberikan dan bersama-sama dengan bimbingan guru memecahkan masalah yang diberukan. 5. Peserta didik mendiskusikan pertanyaan yang telah ditentukan 6. Peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan mendiskusikan jawabannya 7. Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini. 8. Peserta didik menghubungkan jawaban yang ditemukan dengan informasi yang didapat 9. Guru memanggil nomor tertentu dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya sampai semua soal terjawab 10. Masing-masing kelompok menyusun laporan hasil telaah	5 menit 20 menit 10 menit 15 menit 20 menit 20 menit
Penutup	1. Peserta didik dibimbing guru untuk menyimpulkan makna, fungsi, prinsip dan azas dalam peraturan perundang-undangan	15 menit

	2. Melaksanakan refleksi dengan peserta didik atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan 3. Guru menjelaskan recana materi pertemuan berikutnya dan memberi tugas untuk mencari sumber belajar terkait tata urutan peraturan perundang-undangan nasional	

H. PENILAIAN

1) Penilaian Kompetensi Sikap Spiritual

Petunjuk: Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik.

Nama Sekolah :

Kelas/Semester :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke :

Materi Pokok :

Tahun Pelajaran :

No	Nama Peserta Didik	Aspek												Jumlah
		Berdoa			Bersyukur			Memberi salam sebelum/ sesudah presentasi			Mengungkapkan kekaguman saat melihat kebesaran Tuhan			
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														

Petunjuk penskoran:
Skor 3, selalu melakukan aspek pengamatan
Skor 2, kadang-kadang melakukan aspek pengamatan
Skor 1, tidak pernah melakukan aspek pengamatan

Peserta didik memperoleh nilai:
Sangat baik : apabila memperoleh skor 9-12
Baik : apabila memperoleh skor 5-8

Cukup : apabila memperoleh skor 1-4

2) Penilaian Kompetensi Sikap Sosial

Jurnal Perkembangan Sikap Sosial

Petunjuk: Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik

Nama Sekolah :
Kelas :
Hari, Tanggal :
Pertemuan Ke :
Materi Pokok :
Semester :

No	Tanggal	Nama Siswa	Catatan Perilaku	Butir Sikap	Domain Sikap
1					
2					
3					
4					
5					

Keterangan: Guru menuliskan perilaku peserta didik sesuai dengan aspek penilaian yang secara ekstrim ke arah perilaku yang positif maupun negatif

3) Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Soal Tulisan

Indikator Soal	Soal	Bobot	No Soal
Peraturan perundang-undangan	Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	30	1
Fungsi peraturan perundang-undangan	Jelaskan fungsi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan benegara!	35	2
Prinsip peraturan perundang-undangan	Jelaskan prinsip peraturan perundang-undangan!	35	3

Instrumen Observasi Pengetahuan

Kelas :

Semester :

Penilaian LKPD

4) Penilaian Kompetensi Keterampilan

Petunjuk: Penilaian observasi dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam proses diskusi, meliputi: kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/argumentasi, memberi masukan/saran dan mengapresiasi. Serta dalam menyajikan hasil diskusi (presentasi).

Observasi Penilaian Kinerja

Kelas : VIII

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke :

Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya			Kemampuan Menjawab/ Beragumentasi			Memberi Masukan/ Saran			Mengapresiasi		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

Keterangan: diisi dengan tanda ceklist

Kategori 1: kurang 2: cukup 3: baik

Pedoman Penskoran (Rubrik)

No	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 1 apabila tidak pernah bertanya Skor 2 apabila kadang-kadang bertanya Skor 3 apabila sering bertanya
2	Kemampuan Menjawab/ Argumentasi	Skor 1 apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional dan tidak jelas Skor 2 apabila materi/jawaban benar, rasional dan tidak jelas Skor 3 apabila materi/jawaban benar, rasional dan jelas
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 1 apabila jarang memberi masukan Skor 2 apabila kadang-kadang memberi masukan Skor 3 apabila selalu memberi masukan

4	Kemampuan Mengapresiasi	Skor 1 apabila jarang mengapresiasi Skor 2 apabila kadang-kadang mengapresiasi Skor 3 apabila selalu mengapresiasi

Keterangan:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jml. Skor Penilaian}}{\text{Jml. Skor tertinggi}} \times 100$$

Mengetahui
Kepala UPT SMPN 6 Gresik

Drs. MUAFIQ. M.Pd
NIP. 196104111993042002

Guru Mata Pelajaran

IMROATIN RUSLANA,S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : UPT SMP Negeri 6 Gresik
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : VIII/I
Materi Pokok : Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
Waktu : 1 x Pertemuan (3x40 menit)

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1	1.3 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.	1.3.1 Menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.
2	2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan	2.3.1 Menunjukkan sikap menghormati terhadap aturan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional

	perundang-undangan nasional	2.3.2 Menunjukkan sikap taat terhadap aturan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
3	3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia	**3.3.1** Mendeskripsikan makna peraturan perundang-undangan nasional **3.3.2 Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia** 3.3.3 Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia 3.3.4 Menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional
4	4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia	4.3.1 Menunjukkan keterampilan mengamati tentang tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional 4.3.2 Menyusun laporan hasil telaah tentang tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional 4.3.3 Menyajikan laporan hasil telaah tentang tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional

Karakter yang diharapkan untuk dimiliki peserta didik meliputi rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan disiplin

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menghayati nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
2. Menerapkan sikap taat terhadap aturan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
3. Menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
4. Menyajikan laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional

D. MATERI PEMBELAJARAN

1. Materi Reguler

a) Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c) Ketetapan MPR
d) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
e) Peraturan Pemerintah

f) Peraturan Presiden
g) Peraturan Daerah Provinsi
h) Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
i) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

2. Materi Remedial

Kasus-kasus terbaru di media terkait dengan masalah peraturan daerah yang tidak sesuai dengan UUD 1945

3. Materi Pengayaan

a) Azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai UU No 12 Tahun 2011
b) Azas materi peraturan perundang-undangan sesuai UU No 12 Tahun 2011

E. METODE/MODEL PEMBELAJARAN

Metode : Diskusi

Model pembelajaran : Problem Based Learning dan Think Pair Share

F. MEDIA PEMBELAJARAN

Media: Video kasus razia polisi dan power point materi makna peraturan perundang-undangan

Alat/bahan: laptop. Proyektor, speaker

G. SUMBER BELAJAR

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3) Dedi Ismatullaah dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Kehidupan Ketatanegaraan di Negara republic Indonesia*. Bandung:Pustaka Setia
4) Jimly Asshiddique. 2009. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	5. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran, kebersihan dan	15 menit

	kerapian kelas, kesiapan buku tulis serta sumber belajar 6. Guru memberi motivasi dengan cara menampilkan tayangan video yang memperlihatkan ketridaktaatan terhadap peraturan 7. Guru melakukan apresiasi melalui tanya jawab mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tata peraturan perundang-undangan 8. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai	
Inti 7. Orientasi 8. Merumuskan masalah 9. Merumuskan hipotesis 10. Mengumpulkan data 11. Menguji hipotesis 12. Merumuskan kesimpulan	11. Guru memberikan materi pengantar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional 12. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan masing-masing siswa dalam setiap kelompoknya mendapat nomor urut 13. Peserta didik mengamati kasus yang diberikan oleh guru tentang kasus kontroversi Full Day School 14. Peserta didik secara berkelompok menjawab pertanyaan yang diberikan dan bersama-sama dengan bimbingan guru memecahkan masalah yang diberukan. 15. Peserta didik mendiskusikan pertanyaan yang telah ditentukan 16. Peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan mendiskusikan jawabannya 17. Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini. 18. Peserta didik menghubungkan jawaban yang ditemukan dengan informasi yang didapat 19. Guru memanggil nomor tertentu dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya sampai semua soal terjawab 20. Masing-masing kelompok menyusun laporan hasil telaah	5 menit 20 menit 10 menit 15 menit 20 menit 20 menit

Penutup	4. Peserta didik dibimbing guru untuk menyimpulkan makna, fungsi, prinsip dan azas dalam peraturan perundang-undangan 5. Melaksanakan refleksi dengan peserta didik atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan 6. Guru menjelaskan recana materi pertemuan berikutnya dan memberi tugas untuk mencari sumber belajar terkait tata urutan peraturan perundang-undangan nasional	15 menit

I. PENILAIAN

1) Penilaian Kompetensi Sikap Spiritual

Petunjuk: Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik.

Nama Sekolah :

Kelas/Semester :

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke :

Materi Pokok :

Tahun Pelajaran :

No	Nama Peserta Didik	Aspek												Jumlah
		Berdoa			Bersyukur			Memberi salam sebelum/ sesudah presentasi			Mengungkapkan kekaguman saat melihat kebesaran Tuhan			
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														

Petunjuk penskoran:
Skor 3, selalu melakukan aspek pengamatan
Skor 2, kadang-kadang melakukan aspek pengamatan
Skor 1, tidak pernah melakukan aspek pengamatan

Peserta didik memperoleh nilai:
Sangat baik : apabila memperoleh skor 9-12
Baik : apabila memperoleh skor 5-8
Cukup : apabila memperoleh skor 1-4

2) Penilaian Kompetensi Sikap Sosial

Jurnal Perkembangan Sikap Sosial

Petunjuk: Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik

Nama Sekolah :
Kelas :
Hari, Tanggal :
Pertemuan Ke :
Materi Pokok :
Semester :

No	Tanggal	Nama Siswa	Catatan Perilaku	Butir Sikap	Domain Sikap
1					
2					
3					
4					
5					

Keterangan: Guru menuliskan perilaku peserta didik sesuai dengan aspek penilaian yang secara ekstrim ke arah perilaku yang positif maupun negatif

3) Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Soal Tulisan

Indikator Soal	Soal	Bobot	No Soal
Peraturan perundang-undangan	Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	30	1
Fungsi peraturan perundang-undangan	Jelaskan fungsi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan benegara!	35	2
Prinsip peraturan perundang-undangan	Jelaskan prinsip peraturan perundang-undangan!	35	3

Instrumen Observasi Pengetahuan

Kelas :

Semester :

Penilaian LKPD

4) Penilaian Kompetensi Keterampilan

Petunjuk: Penilaian observasi dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam proses diskusi, meliputi: kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/argumentasi, memberi masukan/saran dan mengapresiasi. Serta dalam menyajikan hasil diskusi (presentasi).

Observasi Penilaian Kinerja

Kelas : VIII

Hari, Tanggal :

Pertemuan Ke :

Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya			Kemampuan Menjawab/ Beragumentasi			Memberi Masukan/ Saran			Mengapresiasi		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1													
2													
3													
4													
5													

Keterangan: diisi dengan tanda ceklist

Kategori 1: kurang 2: cukup 3: baik

Pedoman Penskoran (Rubrik)

No	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 1 apabila tidak pernah bertanya Skor 2 apabila kadang-kadang bertanya Skor 3 apabila sering bertanya
2	Kemampuan Menjawab/ Argumentasi	Skor 1 apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional dan tidak jelas Skor 2 apabila materi/jawaban benar, rasional dan tidak jelas Skor 3 apabila materi/jawaban benar, rasional dan jelas
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 1 apabila jarang memberi masukan Skor 2 apabila kadang-kadang memberi masukan Skor 3 apabila selalu memberi masukan

4	Kemampuan Mengapresiasi	Skor 1 apabila jarang mengapresiasi Skor 2 apabila kadang-kadang mengapresiasi Skor 3 apabila selalu mengapresiasi

Keterangan:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jml. Skor Penilaian}}{\text{Jml. Skor tertinggi}} \times 100$$

Mengetahui
Kepala UPT SMPN 6 Gresik

Drs. MUAFIQ. M.Pd
NIP. 196104111993042002

Guru Mata Pelajaran

Imroatin Ruslana,S.Pd

BAB 3

BAHAN AJAR PPKn

Makna Peraturan Perundang-undangan



Kompetensi Dasar

- Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia

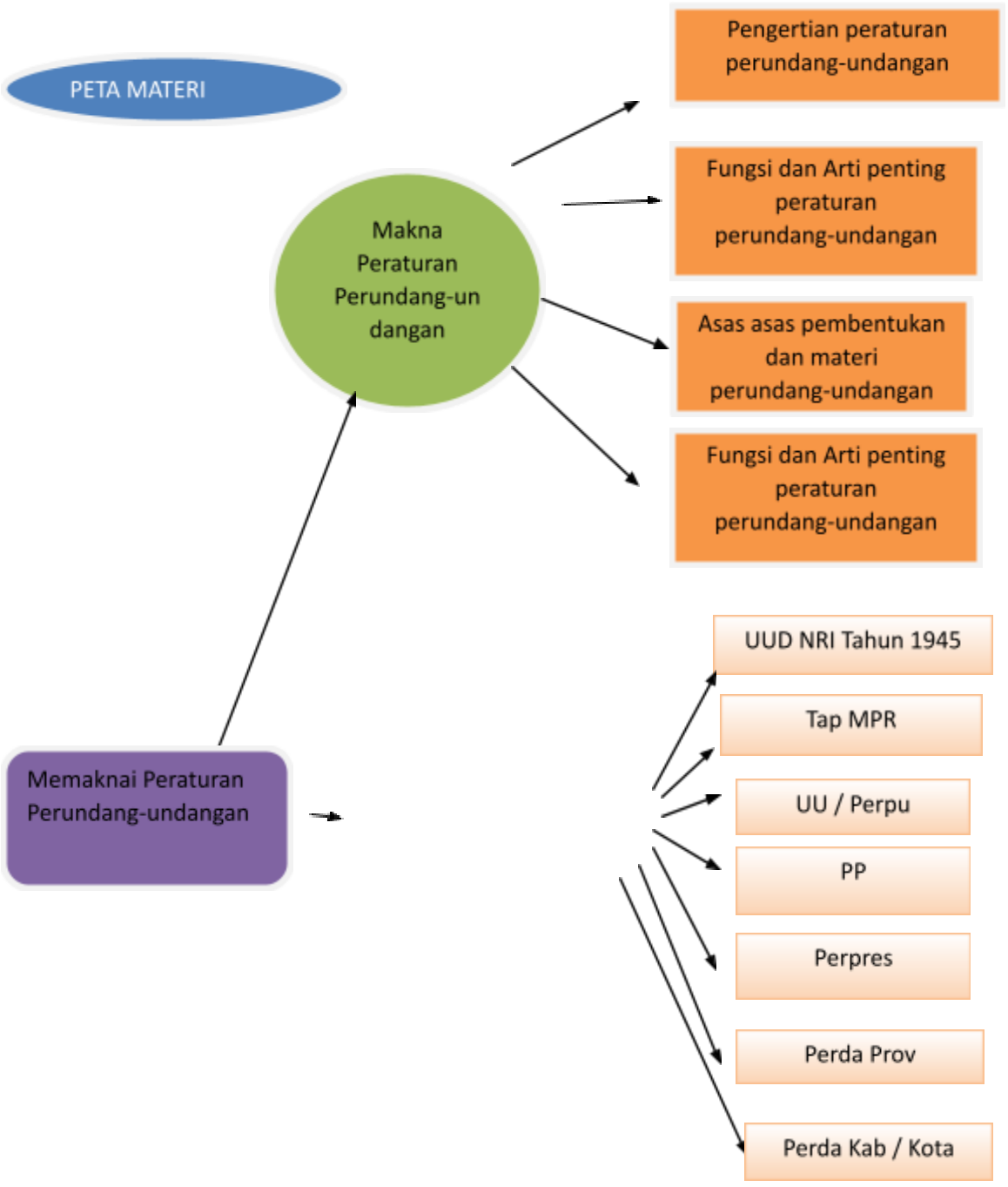
Indikator

- Menjelaskan makna tata urutan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pembelajaran

Melalui bahan ajar ini peserta didik dapat mempelajari:

- Makna peraturan perundang-undangan
- Asas-asas pembentukan dan materi peraturan perundang-undangan nasional
- Hierarki peraturan perundang-undangan nasional menurut UU No 12 Tahun 2011


PETA MATERI
Pengertian peraturan perundang-undangan
Fungsi dan Arti penting peraturan perundang-undangan
Makna Peraturan Perundang-un dangan
Asas asas pembentukan dan materi perundang-undangan
Fungsi dan Arti penting peraturan perundang-undangan
UUD NRI Tahun 1945
Tap MPR
UU / Perpu
PP
Perpres
Perda Prov
Perda Kab / Kota
Memaknai Peraturan Perundang-undangan

Pernahkah kalian memperhatikan perilaku di jalan raya? Di jalan raya banyak sekali orang yang berlalu lintas tidak beraturan. Jika hal itu terus dilakukan, maka kehidupan menjadi tidak tertib dan teratur.



Maka dari itu di kehidupan bernegara dibutuhkan peraturan atau ketentuan-ketentuan agar aman dan tertib.





Negara membuat ketentuan-ketentuan itu, dan warga wajib mematuhinya.

Ketentuan-ketentuan itu disebut peraturan perundang-undangan. Untuk

memahami tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, marilah kita pelajari materi berikut dengan seksama.

A. Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional

Tahan? Bayangkan seandainya tidak ada peraturan di
mas acau bukan?

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22 A tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, materi undang-undang tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.



Gambar 3.1. Indonesia Negara Hukum

Sumber: https://1.bp.blogspot.com/- /Perundang-undangan.jp

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. (Salikun dkk :2017:53)

Menurut Prof. Bagir Manan (1987:13), Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

a. Peraturan Tertulis

Apa yang dimaksud dengan peraturan tertulis sampai saat ini belum ada definisi yang pasti. Peraturan yang tertulis tidak sama dengan peraturan yang ditulis. Yurisprudensi misalnya, adalah bukan peraturan tertulis, walaupun bentuk fisiknya ditulis. Peraturan tertulis mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

> Peraturan perundang-undangan memiliki sifat tertulis dan dibuat lembaga/pejabat negara.

1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah segala peraturan yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesiua Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden ,Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.;
2) Peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang;
3) Pembuatan peraturannya melalui prosedur tentu;

4) Apabila dicermati maka baik Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesiua Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden tersebut ditempatkan di dalam lembaran negara, dan Peraturan Daerah ditempatkan dalam lembaran daerah. Dengan demikian peraturan tersebut ditempatkan di lembaran resmi.

b. Dibentuk Oleh Lembaga Negara Atau Pejabat Negara

Peraturan perundang-undang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara. Hal ini berbeda dengan norma agama misalnya, yang merupakan wahyu dari Allah swt. Disamping dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara, peraturan perundang-undangan juga dapat memuat sanksi bagi pelanggarnya, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh alat negara. Dengan demikian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan datangnya dari luar, yakni dipaksakan dengan sanksi. Sedangkan kepatuhan terhadap norma agama datangnya dari dalam, yakni kesadaran diri sendiri untuk mematuhinya. Pengertian peraturan perundang-undangan di dalam UU PPP (uu no.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan) dirumuskan secara lebih utuh, memuat norma hukum yang mengikat, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan maupun prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

- Ap  turan perundang-undangan? Mari kita pelajari!

Peraturan perundang-undangan bukan hanya sebuah peraturan yang dibuat tanpa fungsi. Dimana peraturan perundang-undangan memiliki fungsinya tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga memiliki arti penting dalam sistem hukum nasional.

a. **Fungsi peraturan perundang-undangan** dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
   1) Sebagai norma hukum bagi warga negara karena berisi peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Bagi mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terjamin rasa keadilan dan kebenaran.
   2) Menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antarsesama manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat.
   3) Untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera, aman, rukun, dan harmonis.
   4) Untuk menciptakan suasana aman, tertib, tenteram, dan kehidupan yang harmonis
   5) Untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara.
   6) Untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia.



Gambar 3.2 Fungsi peraturan sebagai perlindungan hak di bidang pendidikan
https://teguhmelangkah.wordpress.com/2017/07/02/ironi-mencerdaskan-kehidupan-bangsa/

b. **Arti penting peraturan perundang-undangan** dalam sistem hukum nasional.
   Berikut adalah arti penting peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional:
   1) Pedoman para penyelenggara
   2) Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara
   3) Memberikan rasa keadilan bagi warga negara.
   (Yuniandar:2017)

2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia



Gambar 3.3. Hierarki tata urutan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa per aturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.
c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, di-cabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan per-undang-undangan yang lama.
e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan per-aturan perundang-undangan yang bersifat umum.
g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke **Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”)** yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Apa isi materi dari peraturan perundang-undangan?

Siapakah yang membuat peraturan perundang-undangan?

Bagaimana proses pembuatan peraturan perundang-undangan?

Kita pelajari bersama-sama yukkk????



Yang Berwenang Menetapkan/Mengesahkan Peraturan Perundang-undangan dan Muatan yang Diatur di Dalamnya

No	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Yang Berwenang Menetapkan/Mengesahkan	Materi Muatan yang Diatur
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945")	Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).[3]	Materi muatan UUD 1945 meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara dan sebagainya.[4]
2	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat	Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.	Yang dimaksud dengan "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.[5]







3	Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("Perppu")	Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.[6] Perppu ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.[7]	Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang yaitu:[8] a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan Undang-Undang.[9]
4	Peraturan Pemerintah	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.[10]	Berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.[11]
5	Peraturan Presiden	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.[12]	Berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan menyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.[13]



6	Peraturan Daerah ("Perda") Provinsi	Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi.[14]	Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.[15]
7	Perda Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[16]	Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.[17]

(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia)

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu sebagai berikut:

a. **Kejelasan tujuan** adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. **Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat** adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undang-an tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang.
c. **Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan** adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memper hatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
d. **Dapat dilaksanakan** adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara flosofs, sosiologis, maupun yuridis.
e. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan** adalah bahwa setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. **Kejelasan rumusan** adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. **Keterbukaan** adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk mem-berikan masukan dalam pembentukan.

Selanjutnya, ditegaskan dalam Pasal 6 bahwa **materi muatan** peraturan per-undang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut.

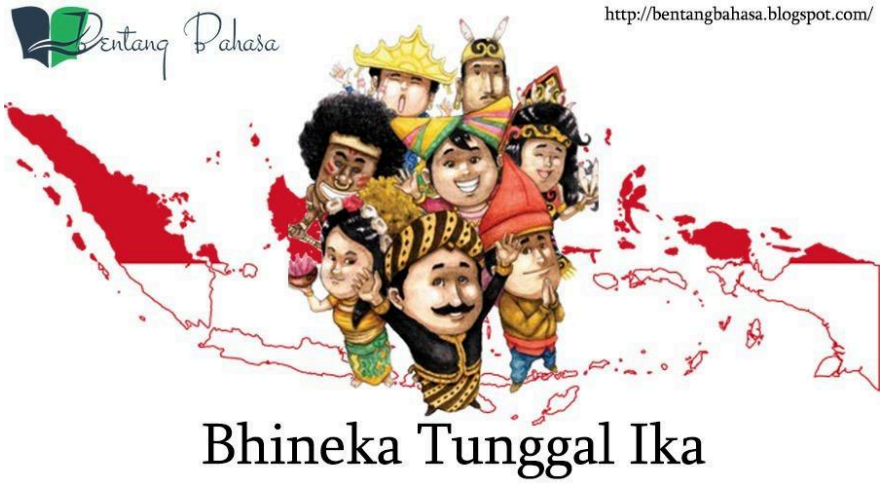
a. **Pengayoman** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
b. **Kemanusiaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.



Gambar 3.3 Peraturan yang harus mencerminkan perlindungan HAM
http://palembang.tribunnews.com/2018/07/31/begini-cara-bps-hitung-hitungan-angka-kemiskinan-di-indonesia

c. **Kebangsaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. **Kekeluargaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. **Kenusantaraan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. **Bhinneka Tunggal Ika** adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Gambar 3.4 Asas bhineka tunggal ika peraturan perundang-undangan
http://bentangbahasa.blogspot.com/2017/12/dongeng-anak-bhineka-tunggal-ika.html

g. **Keadilan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. **Kesamaan kedudukan** dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. **Ketertiban dan kepastian hukum** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. **Keseimbangan**, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. (Lukman,Ida Royani, dan Salikun: 2017)

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

KELAS VIII

SMP

MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KOMPETENSI DASAR:

- Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia

INDIKATOR

- Menjelaskan makna tata urutan peraturan perundang-undangan.
- Menganalisis proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Mendeskripsikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui pengerjaan LKPD berikut peserta didik dapat memahami:

- **Pengertian peraturan perundang-undangan**
- **Asas-asas peraturan perundang-undangan**
- **Tata urutan peraturan perundang-undangan**
- **Proses pembuatan peraturan perundang-undangan**
- **Sikap ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.**



LKPD 8.3.1

- Amati video tentang peraturan di masyarakat yang ditayangkan guru!
- Catat hal-hal penting mengenai:
    - Bentuk peraturan yang ada di dalam video tersebut
    - Tujuan dari peraturan itu dibuat
    - Hal yang terjadi apabila tidak ada peraturan tersebut di masyarakat
- Setelah mengamati dan mencatat hal-hal penting dalam video tersebut simak pemaparan materi guru tentang peraturan perundang-undangan!
- Bentuklah kelompok yang terdiri atas 6 anak sesuai dengan nomor urut presensi di kelas!
- Diskusikan bersama kelompokmu tentang materi makna peraturan perundang-undangan!
- Setelah mendiskusikan materi tentang makna peraturan perundang-undangan bacalah uraian berikut ini!



Gb 1.Peraturan di jalan raya





Gb.2 Peraturan membayar pajak

Gb. Peraturan Larangan merokok

Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Tidak ada, sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil, dan tidak terpengaruh oleh teknologi. Demikian juga dalam masyarakat perkotaan, nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi warganya.

Setelah kalian membaca dan mencermati uraian di atas, silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompokmu dengan mencari informasi dari berbagai sumber kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan uraian tersebut.

Pertanyaan

Jawablah pertanyaan berikut dengan pendapat dan bahasamu sendiri!

- **Berdasarkan uraian tersebut, mengapa peraturan itu diperlukan dalam masyarakat?**
- **Apa yang akan terjadi apabila di masyarakat tidak ada peraturan?**
- **Sebutkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia!**
- **Ambil salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang kamu ketahui, analisislah peraturan tersebut apakah sudah sesuai dengan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan atau belum?**

Jawaban

- .....
- .....
- .....

KUNCI JAWABAN

LK 8.3.1

TUGAS KELOMPOK

Menjawab Pertanyaan

1. Peraturan diperlukan dalam masyarakat karena peraturan sebagai alat untuk mengatur tingkah laku masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Dengan adanya peraturan dapat mengendalikan tingkah laku warga negara. Peraturan atau hukum sangat diperlukan karena memiliki fungsi:

a. Melindungi kepentingan dan hak manusia
b. Memberikan kepastian hukum
c. Menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat.
d. Sarana mewujudkan keadilan sosial
e. Menyelesaikan pertikaian

2. Akibat tidak adanya peraturan di masyarakat:
   a. akan terjadi kekacauan dimasyarakat, dikarenakan tidak adanya pedoman dan petunjuk bagaimana berperilaku di masyrakat. Tidak ada petuntuk benar atau salah, atau apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan.
   b. Keadilan social tidak akan terbentuk, karena tidak ada pengadilan, dan hukuman yang mempunyai sifat mengikat dan member efek jera bagi pelaku. Juga tidak ada efek psikologis di masyarakat yang mengekang dirnya dari berbuat yang tidak seharusnya.
   c. Pembangunan akan sulit dicapai. Peraturan mempunyai sifat mengikat dan memaksa sehingga bisa memaksa warga Negara melakukan kewajiban- kewajibannya baik terhadap masyarakat naupun terhadap negaranya. Contoh:
      dengan adanya peraturan, masyarakat akan membayar pajak dengan teratur dan hal ini akan meyukseskan pembangunan.

3. Peraturan perundang-undangan di Indonesia:
   a. UUD NRI Tahun 1945
   b. Tap MPR
   c. UU dan Perpu
   d. PP
   e. Perpres
   f. Perda Prov
   g. Perda Kab / Kota
4. Sesuai dengan pendapat peserta didik terkait contoh peraturan yang diambil apakah sudah sesuai dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. **Pengayoman** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
b. **Kemanusiaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. **Kebangsaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. **Kekeluargaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. **Kenusantaraan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. **Bhinneka Tunggal Ika** adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
k. **Keadilan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
l. **Kesamaan kedudukan** dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
m. **Ketertiban dan kepastian hukum** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
g. **Keseimbangan**, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara

LAMPIRAN B

RENCANA KERJA

No.	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu ke (tanggal)
1	Observasi	Agustus/4
2	Penyusunan Proposal	September/1-2
3	Pelaksanaan siklus 1	Oktober/2 (12 Oktober 2020)
4	Pelaksanaan siklus 2	Oktober/3-4(19 /26 Oktober 2020)
5	Tabulasi dan analisis data	November/1
6	Penyusunan laporan PTK	November/1

LAMPIRAN C

LEMBAR OBSERVASI GURU DAN PESERTA DIDIK

PEDOMAN OBSERVASI GURU

1. Nama Sekolah :
2. Nama Guru :
3. Mata Pelajaran :
4. Kelas/Semester:
5. Hari / Tanggal :

No	Uraian Kegiatan	YA / ADA		Tidak ada	Nilai	Ket
		Baik	Kurang baik			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	PERSIAPAN					
	a. Silabus					
	b. Program / Rencana Pembelajaran Semester					
	c. Buku nilai : yang memuat nilai ulangan harian, ujian blok, ujian remedi, nilai tugas-tugas lainnya					
2	KEGIATAN PEMBELAJARAN					
	A. PENDAHULUAN					
	a. Pretest/persepsi					
	b. Motivasi siswa/mengecek kesiapan siswa					
	c. Memberitahukan topik pembelajaran : SK/KD					
	B. KEGIATAN POKOK					
	a. Penyiapan Materi Pelajaran					
	b. Penyiapan Media					
	c. Penyajian materi					
	C. PENUTUPAN					
	a. Post Test					
	b. Membuat rangkuman / kesimpulan					
	c. Memberikan tugas / Pekerjaan Rumah (PR)					
Jumlah						
Rata – rata						

Kesimpulan :

Saran / Pembinaan :

Pengamat/Observer, :

PEDOMAN OBSERVASI SISWA

Hari/Tanggal :

Kelas :

Materi :

Nama Guru :

NO	ASPEK PENGAMATAN	KOMENTAR	KET
1	Memperhatikan penjelasan Guru		
2	Mempelajari LKS dengan sungguh-sungguh		
3	Melakukan kegiatan sesuai LKS		
4	Mencatat hasil kegiatan sesuai LKS		
5	Diskusi kelompok tentang hasil kegiatan		
6	Menyusun hasil kegiatan		
7	Mempresentasikan hasil kegiatan kelompok		
8	Menghargai gagasan teman		
9	Menyampaikan gagasan pada kelompok		
10	Mengambil keputusan/ kesimpulan Kelompok		
11	Member tanggapan pada kelompok lain		

12	Bertanggung jawab dan disiplin kerja		
13	Memcatat hasil kesimpulan		

Pengamat,……..……

LEMBAR RESPONDEN SISWA

Nama Siswa :……..

Kelas :……..

Hari/Tanggal :……..

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KET
1	Apakah kamu merasa senang selama mengikuti kegiatan pembelajaran ini ?			
2	Apakah kamu merasa senang terhadap Materi pelajaran?			
3	Apakah kamu merasa senang menggunakan Lembar kerja siswa (LKS)?			
4	Apakah kamu merasa senang Suasana Belajar di Kelas ini?			
5	Apakah kamu merasa senang Cara penyajian materi oleh guru?			
6	Apakah kamu merasa sulit Mengikuti pembelajaran ini?			
7	Apakah pembelajaran ini bermanfaat bagi kamu ?			
8	Apakah pembelajran ini baru bagi kamu?			
9	Apakah kamu menginginkan pokok bahasan yang lain menggunakan model Saintifik?			
	JUMLAH			

Responden,

LAMPIRAN D

DOKUMENTASI



Gambar 1 Kegiatan berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik



Gambar 2. Guru sedang menjelaskan langkah pembelajaran awal untuk mengajak peserta didik berfikir bersama



Gambar 3. Peserta didik sedang berkelompok dan mulai berdiskusi bersama dengan anggota kelompok



Gambar 4. Peserta didik mengalami kesulitan dan bertanya kepada guru, guru memberikan arahan dan melakukan kegiatan komunikasi aktif dua arah



Gambar 5. Peserta didik saling bertukar pendapat antar kelompok sehingga terjadi transfer ilmu antar peserta didik, kelompok, dan guru

LAMPIRAN E

LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK
SIKLUS 1

Nama Sekolah : UPT SMP N 6 Gresik

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/Semester : VIII.B/1

Guru Penelitian : Imroatin Rulana, S.Pd

Materi Pokok : Tata Urutan Perundang-undangan Nasional

Hari/Tanggal : Senin/12 Oktober 2020

Lembar Pengamatan

NO	NIS	NAMA	INDIKATOR PARTISIPASI BELAJAR			FREKU-ENSI
			1	2	3	
1	7659	ADELIA FITRI ANGGRAINI FATMAWATI	V	V		2
2	7499	ADINDA AULIA FIRDAUSI		V		1
3	7627	ADINDA NUR FITRIANI		V		1
4	7596	AHMAD DZIKY ADZKIYA'	V	V	V	3
5	7533	AHMAD MAULANA FIRMANSYAH	V			1
6	7564	AHMAD ROGHI FIKDANIEL		V		1
7	7565	AHMAD SADDAM	V			1
8	7535	ALLONG ANGGA SAPUTRA				
9	7506	ATHIYYA CHALYA FASA PUTRI	V	V		2
10	7538	AYUNDHA DWI NOVIANTY AFANDI		V		1
11	7539	CITRA DWI NOVIA A		V		1
12	7663	DAFA AZZAHRAH ANAN				
13	7666	EDGAR IRFAN MAULANA				
14	7509	EKA ZULFIYYAH ROSITA	V			1
15	7573	FIRDAYANTI HANUM		V		1
16	7511	JUSTINE FAWWAZ AL HAFIZH		V		1
17	7610	LINDI CISTYA PRABA			V	1
18	7518	MUHAMMAD ALFIN NI'AM	V	V		1
19	7693	MUHAMMAD ARIS MAULANA				

20	7584	MUHAMMAD DANI FAIDHIR ROKHMAN			V	1
21	7650	MUHAMMAD FADHIL ABHIRAMA	V			1
22	7651	MUHAMMAD FAUZAN	V	V		1
23	7549	MUHAMMAD KAFKA AMETHIS POETRA		V		1
24	7618	MUHAMMAD ZAHID ABDILLAH				
25	7653	MUHAMMAD ZAKA ABDILLAH MUSTAQIM				
26	7589	NAILATUL IZZAH		V		1
27	7590	NAILU SYIFA'	V		V	2
28	7522	NAYLA IMTIYAS				
29	7623	SANDY SATRIO AJI FAHRUDDIN			V	1
30	7624	TAFIYATUL ANANDA	V			1
31	7594	USLIFATUL MASRUROH		V		1
32	7700	ZINTA NAJMA ANDINY	V			1
	Jumlah siswa yang memiliki Partisipasi Belajar					25
	Presentase					78,1%)

Aspek yang dinilai:

1. Mengajukan pertanyaan
2. Merespon (termasuk menyampaikan usul/pendapat)
3. Memberikan sanggahan

LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK

SIKLUS 2

Nama Sekolah : UPT SMP N 6 Gresik

Mata Pelajaran :PPKn

Kelas/Semester : VIII.B/1

Guru Penelitian : Imroatin Rulana, S.Pd

Materi Pokok : Tata Urutan Perundang-undangan Nasional

Hari/Tanggal : Senin/19 Oktober 2020

Lembar Pengamatan

NO	NIS	NAMA	INDIKATOR PARTISIPASI BELAJAR			FRE KU-ENSI
			1	2	3	
1	7659	ADELIA FITRI ANGGRAINI FATMAWATI	V	V		2
2	7499	ADINDA AULIA FIRDAUSI	V	V	V	3
3	7627	ADINDA NUR FITRIANI		V		1
4	7596	AHMAD DZIKY ADZKIYA'	V	V		2
5	7533	AHMAD MAULANA FIRMANSYAH	V	V	V	3
6	7564	AHMAD ROGHI FIKDANIEL		V		1
7	7565	AHMAD SADDAM	V			1
8	7535	ALLONG ANGGA SAPUTRA				
9	7506	ATHIYYA CHALYA FASA PUTRI	V	V		2
10	7538	AYUNDHA DWI NOVIANTY AFANDI		V		1
11	7539	CITRA DWI NOVIA A		V		1
12	7663	DAFA AZZAHRAH ANAN		V		1
13	7666	EDGAR IRFAN MAULANA	V	V		2
14	7509	EKA ZULFIYYAH ROSITA	V			1
15	7573	FIRDAYANTI HANUM		V		1
16	7511	JUSTINE FAWWAZ AL HAFIZH		V		1
17	7610	LINDI CISTYA PRABA			V	1
18	7518	MUHAMMAD ALFIN NI'AM	V			1
19	7693	MUHAMMAD ARIS MAULANA	V	V		2
20	7584	MUHAMMAD DANI FAIDHIR ROKHMAN			V	1

21	7650	MUHAMMAD FADHIL ABHIRAMA	V			1
22	7651	MUHAMMAD FAUZAN	V		V	2
23	7549	MUHAMMAD KAFKA AMETHIS POETRA		V		1
24	7618	MUHAMMAD ZAHID ABDILLAH	V	V		2
25	7653	MUHAMMAD ZAKA ABDILLAH MUSTAQIM	V			1
26	7589	NAILATUL IZZAH				
27	7590	NAILU SYIFA'	V		V	2
28	7522	NAYLA IMTIYAS		V		1
29	7623	SANDY SATRIO AJI FAHRUDDIN		V		1
30	7624	TAFIYATUL ANANDA	V			1
31	7594	USLIFATUL MASRUROH		V		1
32	7700	ZINTA NAJMA ANDINY	V			1
	Jumlah siswa yang memiliki Partisipasi Belajar					30
	Presentase					93,75%

Aspek yang dinilai:

1. Mengajukan pertanyaan
2. Merespon (termasuk menyampaikan usul/pendapat)
3. Memberikan sanggahan

LAMPIRAN F

LAPORAN HASIL SEMINAR

UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING KOLABORASI THINK PAIR SHARE(TPS) KELAS VIII.B UPT SMP NEGERI 6 GRESIK TTAHUN AJARAN 2020/2021

OLEH:
IMROATIN RUSLANA, S.Pd.

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

UPT SMP NEGERI 6 GRESIK

Jalan Kanjeng Sepuh No. 1 Meriyunan Sidayu

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 6 GRESIK
Jl. Kanjeng Sepuh No.1 Telp. / Fax 031 - 3949021 Sidayu - Gresik

UNDANGAN SEMINAR PTK

Kepada
Yth, Bapak/Ibu guru.....
Di Tempat

DenganHormat,
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh,
Salam Silaturruhim kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru semoga tetap selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.
Mengharap kehadiran Bapak/ Ibu guru pada ;

Hari	: **Senin**
Tanggal	: 12 Oktober 2020
Pukul	: 12.00 s.d13.30 (WIB)
Tempat	: UPT SMPN 6 Gresik
Penyaji	: IMROATIN RUSLANA,S.Pd
Acara	: Seminar, dengan Judul PTK ;

UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING KOLABORASI THINK PAIR SHARE(TPS) KELAS VIII.B UPT SMP NEGERI 6 GRESIK TAHUN AJARAN 2020/2021

Demikian surat undangan ini, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Sidayu, . 10 Oktober 2020

Mengetahui
Kepala UPT SMPN 6 Gresik

Drs. MUAFIQ, M.Pd
NIP. 196104111993042002

Selaku Penanggung jawab Seminar,

IMROATIN RUSLANA,S.Pd

Wassalam

BERITA ACARA SEMINAR

Pada hari ini ***Senin*** Tanggal **12** Oktober Tahun 2020 bertempat di Ruang ***audio visual UPT SMP Negeri 6 Gresik*** pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 Telah diselenggarakan seminar laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul :

UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL *PROBLEM BASED LEARNING* KOLABORASI *THINK PAIR SHARE (TPS)* KELAS VIII.B UPT SMP NEGERI 6 GRESIK TTAHUN AJARAN 2020/2021

Pemateri : IMROATIN RUSLANA, S.Pd.,
Unit kerja : UPT SMP NEGERI 6 GRESIK

Seminar PTK ini dihadiri oleh GURU PPKN yang berjumlah 17 orang yang berasal dari SMP Negeri dan swasta wilayah Sidayu Gresik.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Kepala UPT SMPN 6 Gresik
Selaku Penanggung Jawab

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
UPT SMP NEGERI 6 GRESIK
DINAS PENDIDIKAN

Drs. MUAFIQ. M.Pd
NIP. 196104111993042002

DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR LAPORAN PTK
DISELENGGARAKAN DI UPT SMP NEGERI 6 GRESIK

KABUPATEN GRESIK

Hari/Tanggal Seminar : 12 Oktober Tahun 2020
Tempat/Waktu : UPT SMP NEGERI 6 GRESIK, pukul 12.00 WIB sampai 13.30 WIB
Judul PTK : UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING KOLABORASI THINK PAIR SHARE(TPS) KELAS VIII.BUPT SMP NEGERI 6 GRESIK TAHUN AJARAN 2020/2021
Penyaji /Seminar : IMROATIN RUSLANA, SPd.

No	Nama Guru/Peserta	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Ratna Al Nuril Khasanah	UPT SMPN 6 Gresik	1.
2	Zuni Elen	UPT SMPN 6 GRESIK	2.
3	Didin Tristianto. S.Pd	UPT SMPN 6 Gresik	3.
4	Anisatul Lutfiyah	UPT SMPN 6 Gresik	4.
5	Mat Nafi, S.Si	MTs. Hid. Rahman	5.
6	Nurcik Listyani	UPT SMP 6 Gresik	6.
7	Matokan	UPT SMPN 6 Gresik	7.
8	Anivah	UPT SMPN 21 Gresik	8.
9	Maftuhah	SMPM Pancang	9.
10	Ismatwati	SMPN 6 Gresik	10.
11	Umu maslamah	SMPN 6 Gresik	11.
12	M. Fuadi	MTs. Kanjeng Sepuh	12.
13	Nur Hayati	UPT SMPN 6 Gresik	13.
14	Titik Zubaidah	UPT SMPN 6 Gresik	14.
15	Ali Akbar Maksi	MTs. Nurul Jadid	15.
16	Umi maslamah	UPT SMPN 6 Gre	16.
17	Izzanatus Sholihah	UPT SMPN 6 Gre	17.
18			18.
19			19.
20			20.
21			21.

Kepala UPT SMP Negeri 6 Gresik
Selaku Penanggung jawab

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
UPT SMP NEGERI 6 GRESIK
20580495

MATERI SEMINAR

UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL *PROBLEM BASED LEARNING* KOLABORASI *THINK PAIR SHARE* KELAS VIII.B UPT SMP NEGERI 6 GRESIK TAHUN AJARAN 2020/2021

LATAR BELAKANG

Asumsi Penyebab Masalah Rendahnya Partisipasi Belajar dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Kelas VIII B Tahun Pelajaran 2020/2021

Berdasarkan pengamatan penulis, ditemukan bahwa partisipasi belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UPT SMP Negeri 6 Gresik masih belum maksimal. Hal itu terbukti bahwa masih kurang keterlibatan siswa dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, dan kurangnya kemauan siswa untuk merespon dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar.

No	Faktor	Penyebab Masalah
1	Peserta didik	a. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kurang menarik minat siswa. b. Siswa menganggap mata pelajaran PPKn tidak penting. c. Mudah bosan terhadap pelajaran.
2	Guru	a. Strategi Pembelajaran kurang kreatif dan inovatif. b. Kecenderungan mengunakan model ceramah. c. Kurang memberi motivasi. d. Kurang mendorong siswa untuk mengeluarkan pendapatnya.

3	Proses Pembelajaran	a. Kurang menarik perhatian siswa. b. Penyampaian materi kurang variatif. c. Cenderung satu arah.
4	Materi ajar	Kompleks.

Beberapa kemungkinan penyebab masalah telah dijelaskan diatas sangat berpengaruh terhadap partisipasi belajar siswa. Berdasarkan pengkajian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab masalah paling dominan adalah mudah bosan terhadap pelajaran, hal tersebut berpusat pada model pembelajaran yang diterapkan kurang bervariasi yang terlalu banyak berpusat pada guru Penulis menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran *problem based learning* kolaborasi *Think Pair Sharer*. Melalui metode pembelajaran tersebut diharapkan partisipasi belajar siswa dapat meningkat secara maksimal.

Melalui penerapanmodel *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* diharapkan dapat mengubah kebiasaan, dan model pembelajaran yang semula hanya berpusat pada guru akan berubah menjadi pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator. Selain itu penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* dapat meningkatkan partisipasi belajar dan daya berfikir siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah Penerapan Model *Problem Based Learning* kolaborasi *Think Pair Share* dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam materi memaknai peraturan perundang-undangan pada Siswa Kelas VIII UPT SMP Negeri 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021?".

KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan kajian teoritis sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini perlu mangajukan kerangka pemikiran sebagai berikut:

4. Penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* akan meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan pada Siswa Kelas VIII UPT SMP Negeri 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021.
5. Penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* akan melibatkan siswa dalam Materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan secara aktif.
6. Adanya keterkaitan antara penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* dengan peningkatkan partisipasi belajar siswa dalam Memaknai Peraturan Perundang-undangan pada Siswa Kelas VIII UPT SMP Negeri 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021

HASIL PENELITIAN

Pada waktu sebelum menerapkan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* jumlah siswa yang menunjukan partisipasi dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hanya 12 dari 32 anak atau dipersentasekan 35%. Peneliti menerapkan model pembelajaran baru dalam pembelajaran yaitu melalui penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share.* Hasil setelah penerapan model *Think Pair Share*, jumlah siswa yang menunjukan partisipasi dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan meningkat menjadi 25 dari 32 siswa atau dipersentasekan 78,1%. Akan tetapi hasil pada siklus I ini belum mencapai indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, oleh karena itu peneliti mengadakan revisi dan evaluasi lagi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada siklus II meningkat menjadi 30 dari 32 peserta didik atau dipresentasekan 93,75%. Dapat dikatakan tindakan kelas siklus II ini sudah mencapai indikator yang diinginkan oleh peneliti.

KESIMPULAN

Bertitik tolak dari tindakan yang telah dilaksanakan pada penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

3. Penerapan model *Problem Based Learning* Kolaborasi *Think Pair Share* telah mampu meningkatkan partisipasi belajar dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa Kelas VIII.B UPT SMP Negeri 6 Gresik Tahun Ajaran 2020/2021 sebanyak 30 siswa (93,75%) dari sejumlah 32 anak. Peningkatan partisipasi

belajar siswa diketahui melalui kegiatan lembar pengamatan siswa yaitu pada saat siswa dikenai tindakan dengan menerapkan model *Problem Based Learning* Think Pair Share

4. Partisipasi belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebelum tindakan hanya 12 anak (35%) dari 32 siswa. Putaran Siklus I menunjukkan siswa yang memiliki partisipasi belajar meningkat sebanyak 25 anak (78,1%) dan pada siklus II meningkat menjadi 30 siswa (93,75%). Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat peningkatan sebesar 15,65% dari siklus I ke siklus II. Sementara itu, secara keseluruhan dari kondisi awal, siklus I, dan siklus II mengalami peningkatan sebesar 58,75%.

Foto Saat Seminar



Pendahuluan Pembukaan seminar oleh Moderator



Penyampaian seminar oleh nara sumber



Tanya jawab dan hasil kesimpulan yang di catat oleh notulen



Kesimpulan dan penutup seminar

NOTULEN SEMINAR

Judul : UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR PESERTA DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING KOLABORASI THINK PAIR SHARE (TPS) KELAS VIII.B UPT SMP NEGERI 6 GRESIK TAHUN AJARAN 2020/2021

Tempat : UPT SMPN 6 Gresik

Peserta : 20 Guru

Susunan Acara : 1. Pembukaan 2. Penyajian
3. Tanya jawab 4. Penutup

Tujuan Penelitan : Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar pelajaran IPS peserta didik di UPT SMPN 6 Gresik melalui Model pembelajaran Problem Based Learning dan Think Pair Share di UPT SMPN 6 Gresik

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (*action research*) sebanyak dua siklus. Hasil akhir menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran problem Based Learning dan Think Pair Share Dapat Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Peserta Didik. Hal ini ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar. Indikator yang muncul adalah kemampuan siswa semakin baik.

Pemanfaatan Media Pembelajaran problem Based Learning dan Think Pair Share menunjukkan adanya peningkatan pada pengelolahan pembelajaran serta aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran. Hal tersebut berdampak positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa yang menunjukkan peningkatan.

Gresik, Oktober 2021

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama saya Imroatin Ruslana lahir di Trenggalek 23 Nopember 1970. Saat ini saya menjadi guru di UPT SMP Negeri 6 Gresik, Jawa Timur. Saya menjadi guru honorer kurang lebih sudah 8 tahun, dan Alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kesehatan untuk bisa mengajar dan mengabdikan diri sebagai guru honorer. Saya selain mengajar juga ada tugas tambahan sebagai wali kelas VIIIE, serta setiap tahun ajaran baru juga sebagain panitia penerimaan murid baru dan panitia Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mengisi pemateri yaitu materi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta menyanyikan lagu-lagu Wajib Nasional.

Saya lulusan S1 dengan spesialis mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sebagai guru saya ingin mengembangkan dan mengimplementasikan dalam penganjar dan pendidik siswa-siswi untuk menyiapkan generasi muda yang akan mengisi kemerdekaan ini dengan karakter budi pekerti yang baik dan mempunyai pengtahuan yang unggul serta wawasan yang luas.

Hubungan saya terhadap kepala sekolah, teman sesama guru, dan semua waraga sekolah selalu kompak dan bekerja sama dengan baik demi untuk memajukan sekolah dan menjaga kedisiplinan semua warga sekolah. Selalu ikut bekerja sama dalam team maupun secara individu, selalu saya kerjakan dengan semangat sehingga mendapat hasil yang sangat memuaskan,contohnya dalam mengerjakan lomba Adiwiyata mendapat juara 1 tingkat Nasional sebagai sekolah Adiwiyata mandiri dan juga dalam mengerjakan persiapan akreditasi sekolah dapat akreditasi A.

Selain disekolah saya berkecimpung dalam kegiatan PKK di desa Purwodadi sebagai bendahara PKK dan kader lansia, mengadakan kegiatan - kegiatan penanganan lansia dengan bantuan gratis pemeriksaan darah (kolesterol, gula darah, dan asam urat) serta memberi obat gratis. Dengan semangat dan kekompakan yang tinggi desa Purwodadi mengikuti lomba Lingkungan sehat mendapat juara 1 tingkat nasional.

Harapan saya, saya bisa membahagiakan orang tua saya yang telah susah payah membesarkan dan mendidik saya, mereka selalu memberikan semangat, saran, nasehat, dan dukungan kepada saya baik di waktu senang maupun sedih. Semoga apa yang saya jalankan menjadi amalan yang barokah di dunia dan di akherat. Aamiin.

.